

Buletin Beringharjo ...

Buletin Ekonomi Ringan Khas Seputar Jogja

Memotret Optimisme Perekonomian 2025

Edisi **Februari 2025**

Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi D.I. Yogyakarta



Selamat Atas Penerimaan Penghargaan
Tingkat Kementerian Keuangan

Nagara Dana Ksatria Kolaborasi*

Erli Murti Rahayu Yuniawati

Pelaksana Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY

Berperan aktif dalam pengembangan inovasi "Caping Kang Projo" dengan memberdayakan UMKM dan ekonomi rakyat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hingga Kanwil DJPb DIY menerima apresiasi dari Bupati Kulon Progo serta Kepala Dinas terkait.



***Penghargaan Nagara Dana Ksatria Kolaborasi** merupakan apresiasi bagi pegawai yang aktif, inovatif, dan kolaboratif dalam bekerja serta berbagi pengetahuan/pengalaman dengan pegawai lain sehingga menghasilkan manfaat berupa peningkatan produktivitas, kinerja, dan prestasi bagi unit kerja hingga Kementerian Keuangan.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan rasa syukur kami memanjatkan segala puji kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin dan kehendak-Nya, Buletin Beringharjo kembali hadir di hadapan Anda. Di tengah era keterbukaan dan arus informasi yang semakin masif dengan perkembangan media sosial yang memuat konten melimpah sekarang ini, Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta berusaha memberikan kontribusi pengayaan literasi khususnya perkembangan fiskal di wilayah D.I. Yogyakarta.

Kami berharap bahwa hasil kajian yang kami ungkap dalam buletin ini dapat menjadi sajian yang menarik untuk dinikmati baik kalangan akademisi, pengamat, pencari ilmu, dan masyarakat pada umumnya. Khususnya bagi para pemangku kepentingan, informasi yang kami sajikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.

Selamat membaca dan mengambil manfaat dari karya kolektif kami ini, dengan segala keterbukaan dan kelapangan, kami terima saran dan masukan pembaca yang budiman untuk kebaikan di edisi mendatang.

Agung Yulianta

Kepala Kanwil DJPb Provinsi
D.I. Yogyakarta



Buletin Beringharjo

Buletin Ekonomi Ringan Khas Seputar Jogja

BULETIN BERINGHARJO yang merupakan akronim dari Buletin Ekonomi Ringan Khas Seputar Jogja adalah Buletin Fiskal dan Ekonomi Regional yang disusun secara bulanan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Buletin Beringharjo memiliki Visi “Mewujudkan Informasi Edukasi Fiskal dan Perekonomian Guna Mengoptimalkan Peran *Treasurer, Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* di DIY”.

Setiap bulannya, Buletin Beringharjo mengusung tematik yang berganti-ganti dengan konten antara lain : **(1) Rubrik Intisari Laporan ALCo Regional**, yang berisi perkembangan capaian fiskal, moneter dan perekonomian DIY; **(2) Rubrik Insight Den Baguse**, yang mengupas paparan tematik dengan kemasan menarik dari penulis lingkup internal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta; **(3) Rubrik Wawancara Tokoh**, yang berisi wawancara dengan para pengambil kebijakan terkait tema yang sedang menjadi fokus buletin, **(4) Rubrik Edukasi**, yang berisi sosialisasi dari Bagian/Bidang lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta sesuai tuis masing-masing secara bergantian; **(5) Rubrik Angkringan**, yang mengupas paparan tematik dengan kemasan menarik dari penulis eksternal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta; **(6) Rubrik Serba-Serbi**, yang berisi artikel menarik dan ringan yang disesuaikan dengan tematik; dan **(7) Rubrik Klinik SDM**, berisi artikel, opini, sosialisasi program dan peraturan terkait SDM yang ditulis oleh Biro SDM Setjen dan Bagian SDM Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan; **(8) Rubrik Warta KPPN**, yang berisi penyampaian informasi KPPN terkait pelaksanaan peran *Treasurer, Regional Economist and Financial Advisory (TREFA)* KPPN maupun aspek lain seperti pengelolaan SDM, pelayanan stakeholders dan lain-lain yang relevan dengan pelaksanaan tuis KPPN; **(9) Rubrik Mozaik**, yang berisi tulisan ringan dengan tema lepas; **(10) Rubrik Pop Culture**, berisi ulasan mengenai budaya yang sedang trending baik musik, film, kuliner dan komunitas; dan **(11) Rubrik Agenda Kegiatan**, berisi rangkuman kegiatan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang sesuai dengan tematik Buletin.

Kami harapkan kehadiran Buletin Beringharjo dapat menyebarluaskan informasi terkait capaian kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian Provinsi DIY secara efektif dan mudah dipahami. Kami juga mengharapkan Buletin Beringharjo dapat menjadi sarana peningkatan literasi baik bagi seluruh *stakeholders* pada khususnya maupun bagi seluruh masyarakat pada umumnya.



Memotret Optimisme Perekonomian 2025

Para pembaca yang budiman,

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada. Dengan kebijakan fiskal yang berorientasi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai strategi, seperti peningkatan investasi dan percepatan transformasi digital. Stabilitas ekonomi makro tetap menjadi prioritas utama, mengingat dinamika global yang masih penuh ketidakpastian akibat perubahan geopolitik, inflasi global, dan potensi perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama.

Di sisi lain, optimisme atas prospek perekonomian DIY pada tahun 2025 juga terus berlanjut. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dan masih terus berlanjut, geliat sektor UMKM dan ekonomi kreatif serta masih kokohnya sektor pariwisata dan jasa pendidikan menjadi *backbone* DIY menuju target pertumbuhan 6% pada tahun 2026 nanti. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, perekonomian DIY diproyeksikan tetap tumbuh positif, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Melalui edisi Buletin Beringharjo bulan Februari, kami ingin mengajak para pembaca untuk melihat berbagai isu terkait proyeksi perekonomian tahun 2025. Ulasan menarik kami hadirkan pada rubrik Wawancara Tokoh bersama Kepala BAPPERIDA DIY membahas prospek perekonomian DIY ke depan beserta berbagai ulasan menarik lainnya yang dapat pembaca nikmati pada Buletin Beringharjo Edisi 2/2025 yang mengangkat tema “**MEMOTRET OPTIMISME PEREKONOMIAN 2025**” dengan menghadirkan berbagai *insight* dari pihak-pihak yang berkompeten.

Selamat Membaca!

Salam,

Redaksi



Daftar Isi

Edisi Februari 2025

- 06 **Intisari Laporan ALCo Regional**
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Serta Keseimbangan Primer DIY s.d. Januari 2025
 - Progres Capaian Belanja APBN s.d. Januari 2025
 - Proges Capaian Penyaluran KUR dan UMi s.d. Januari 2025
 - Realisasi TKDD DIY s.d. Januari 2025
 - Peranan Fiskal terhadap Percepatan Transformasi Ekonomi DIY
 - Melihat Lebih Dekat Peran KPPN Yogyakarta sebagai Financial Advisor
- 19 **Insight Den Baguse**
 - Melihat Prospek Pariwisata DIY dan Tantangannya di Tahun 2025
- 22 **Wawancara Tokoh**
 - DIY Ingin Memiliki Pertumbuhan Ekonomi yang Settle dan Kontinu, Bukan Sekadar Tumbuh dalam Jangka Pendek
- 28 **Edukasi**
 - Mengetahui Sistem Neraca Nasional dengan Segala Manfaatnya
- 32 **Angkringan**
 - Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2025
 - Prospek Ekonomi Indonesia 2025: Mencoba Mengulang Sejarah
- 40 **Serba-Serbi**
 - #KaburAjaDulu: Lari dari Kenyataan atau Strategi Finansial Cerdas?
- 44 **Warta KPPN**
 - Melihat Lebih Dekat Peran KPPN Yogyakarta sebagai Financial Advisor
- 48 **Mozaik**
 - Treasury Learning Center, Wahana Edukasi dan Riset tentang APBN di Jantung DIY
- 51 **Pop Culture**
 - Mengetahui Ecoprint, Karya Seni Baru dari Alam
- 54 **Kaleidoskop Kegiatan**



06



19



22



28



32



40



48



51



44



Foto: Canva

D.I. Yogyakarta: **Ekonomi dan APBDN**

Kinerja Fiskal Regional s.d. Januari 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, SERTA KESEIMBANGAN PRIMER DIY S.D. JANUARI 2025

Kinerja Pendapatan Negara tumbuh negatif yang mencerminkan tantangan struktural untuk mencari sumber penerimaan dalam mengantisipasi berkurangnya potensi perpajakan. kinerja Belanja Negara tumbuh negatif menunjukkan penghematan dan pengurangan anggaran dalam berbagai sektor.

-5,96%

2024 **2025**
Rp797,35 M **↑** Rp749,87 M

Pada awal tahun 2025, kinerja Pendapatan dan Hibah sebesar Rp749,87 miliar tumbuh negatif 5,96%.

Penurunan tersebut disumbang oleh kinerja penerimaan perpajakan mengalami kontraksi cukup signifikan yang disebabkan antara lain oleh pengalihan penerimaan pajak WP cabang ke pusatnya.

Penurunan penerimaan pajak juga terjadi pada sektor administrasi pemerintahan sebagai dampak penurunan pencairan dari APBN/APBD bulan Januari 2025.

Sementara itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan menggembirakan sebesar 38,29% yang disumbang oleh kenaikan penerimaan pendapatan BLU khususnya yang berasal dari pendapatan layanan kesehatan.

Kinerja Belanja Negara tumbuh negatif 9,56%. Hampir seluruh komponen Belanja Negara mengalami penurunan. Penurunan signifikan terdapat pada Belanja Modal dan Belanja Barang disebabkan adanya proses penetapan SOTK serta pelantikan pejabat baru pada sebagian satker dan adanya pemblokiran pada sebagian besar Belanja Modal.

Dari sisi Belanja TKD, penurunan disebabkan belum tersalurkannya Dana Desa di bulan Januari serta penurunan realisasi Dana Bagi Hasil yang signifikan.

Keseimbangan primer sebesar Rp881,36 miliar menunjukkan tren negatif lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif Pendapatan dan Hibah yang lebih kecil dari pertumbuhan negatif Belanja Negara.



Pendapatan dan Hibah DIY s.d. Januari 2025

21,42%



Realisasi s.d. Jan 2025
Rp749,87 M

Pagu APBN 2025
Rp3.500,59 M

Kontribusi Penerimaan



Pajak
Rp499,48 M



PNBP
Rp250,39 M



Hibah
Rp 0 M

Belanja Negara DIY s.d. Januari 2025

Belanja Pemerintah Pusat (K/L)

-22,07%

2024 **2025**
Rp480,06 M **↑** Rp374,09 M

3,40%



Realisasi s.d. Jan 2025
Rp374,09 M

Pagu APBN 2025
Rp11.014,11 M

Belanja TKDD

-5,02%

2024 **2025**
Rp1.323,61 M **↑** Rp1.257,13 M

12,22%



Realisasi s.d. Jan 2025
Rp1.257,13 M

Pagu APBN 2025
Rp10.283,93 M

Sumber : Laporan ALCo Bulan Februari 2025

PROGRES CAPAIAN BELANJA APBN S.D. JANUARI 2025

KESEHATAN

Sektor Kesehatan di DIY juga mendapatkan perhatian dengan antara lain alokasi melalui belanja K/L pagu Rp1,53 triliun, blokir Rp15,80 miliar, realisasi Rp17,29 miliar (1,13%). Alokasi tersebut dilaksanakan oleh Kemenkes, BKKBN, BPOM antara lain untuk:

1. Penelitian dan pengembangan RS di Bidang Klinis
2. Alat Kesehatan, Alat Nonmedis, dan Ambulans
3. Obat-obatan
4. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
5. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
6. Pelatihan Tenaga Kesehatan

Selain belanja K/L, juga terdapat alokasi melalui belanja TKD pagu Rp353,07 miliar, belum terdapat realisasi. Jenis TKD pendukung kesehatan antara lain:

1. DAU bidang Kesehatan alokasi Rp112,79 miliar
2. DAK Fisik melalui penguatan sistem kesehatan dan Keluarga Berencana total alokasi Rp78,26 miliar
3. DAK Non Fisik melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan alokasi Rp162,02 miliar

PENDIDIKAN

Sektor pendidikan mendapatkan alokasi yang cukup signifikan antara lain melalui belanja K/L dengan total pagu Rp773,35 miliar, blokir Rp71 miliar, realisasi Rp10,54 miliar (1,36%). Alokasi tersebut dilaksanakan oleh BRIN, Kemenag, Kemenbud, Kemenkes, Kemenaker, Kemenkomdigi, Kemenpora, Kemendikdasmen, Kemendikti, Kemenperin, Kementan, dan Perpustakaan antara lain untuk:

1. BOPTN (Bantuan Operasional PTN)
2. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

3. Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah

4. Insentif Guru

Selain melalui belanja K/L, juga terdapat alokasi melalui belanja TKD pagu Rp2,07 triliun realisasi Rp372,9 miliar (18,01%). Jenis TKD pendukung pendidikan antara lain:

1. DAU bidang pendidikan alokasi Rp242,25 miliar
2. DAK Fisik melalui subbidang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB total alokasi Rp57,78 miliar
3. DAK Non Fisik melalui Tunjangan Profesi Guru serta Tambahan Penghasilan Guru, BOS, BOP PAUD, BPP perpustakaan Daerah dengan alokasi Rp1,77 triliun, realisasi Rp372,9 miliar (21,02%)

INFRASTRUKTUR

APBN digunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan infrastruktur di DIY dengan alokasi antara lain melalui belanja K/L dengan total pagu Rp2,32 triliun, blokir Rp2,32 triliun (99,84% pagu) belum terdapat realisasi. Alokasi tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, antara lain untuk:

1. Operasi dan Pemeliharaan Sungai
2. Rehabilitasi Irigasi
3. Pembangunan Prasarana Air Baku
4. Pelebaran Jalan Menuju Standar
5. Bendungan Bener

Pembangunan infrastruktur melalui Belanja TKD pagu Rp425,81 miliar, belum terdapat realisasi. Jenis TKD pendukung Infrastruktur antara lain:

1. DAU melalui bidang Pekerjaan Umum alokasi Rp88,33 miliar
2. DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan untuk menyediakan sarana dan prasarana fisik layanan dasar antara lain bidang pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan alokasi Rp337,48 miliar

KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan juga menjadi prioritas pemerintah antara lain melalui belanja K/L total pagu Rp72,73 miliar, blokir Rp13,53 miliar, realisasi Rp2,20 miliar (3,02%). Alokasi tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain untuk:

1. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) 40,87%
2. Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi
3. Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen

Selain melalui belanja K/L, juga terdapat alokasi melalui belanja TKD pagu Rp159,89 miliar, belum terdapat realisasi. Jenis TKD pendukung ketahanan pangan antara lain:

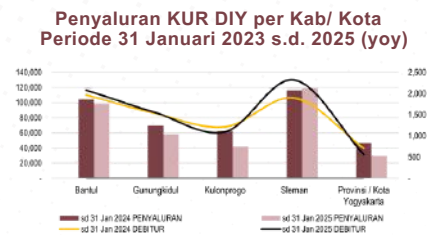
1. DAK Fisik melalui Kawasan Produk Pangan Nasional (pangan pertanian, pangan akuatik, irigasi, konektivitas subbidang jalan) total alokasi Rp111,05 miliar
2. DAK Non Fisik melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan alokasi Rp14,79 miliar
3. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan alokasi Rp34,05 miliar.





P ROGRES CAPAIAN PENYALURAN KUR DAN UMI S.D. JANUARI 2025

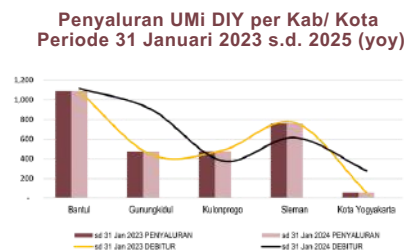
Penyaluran KUR s.d. 31 Januari 2025 penyaluran KUR sudah mencapai Rp346,70 miliar untuk 7.602 debitur dengan penyaluran tertinggi pada Kabupaten Sleman sebesar Rp118,86 miliar untuk 2.319 debitur.



Sumber Data : Aplikasi SIKP, diolah

Penyaluran KUR DIY dengan 3 (tiga) penyaluran terbesar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp159,48 miliar kepada 2.701 debitur; selanjutnya sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp82,23 miliar kepada 1.891 debitur; dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya dan Hiburan sebesar Rp54,79 miliar kepada 1.055 debitur.

Dari sisi penyalur, penyaluran terbesar melalui BRI sebesar Rp214,71 miliar kepada 6.179 debitur, selanjutnya Bank Mandiri sebesar Rp60,14 miliar kepada 665 debitur, dan BPD DIY sebesar Rp50,61 miliar kepada 640 debitur.



Sumber Data : Aplikasi SIKP, diolah

Dengan adanya Permenko 1 Tahun 2023 yang baru disahkan di akhir Januari serta perubahan sistem dalam SIKP karena adanya perubahan yang signifikan dalam peraturan penyaluran KUR tahun 2023 sehingga bank baru bisa menyalurkan KUR pada pertengahan Februari 2023. Dengan

demikian tidak ada penyaluran KUR s.d. 31 Januari 2023. Sedangkan untuk Penyaluran UMi s.d. 31 Januari 2025 pada aplikasi SIKP baru tertampil atau diinput untuk beberapa daerah saja (*in progress*).

KENDALA PENYALURAN KUR DI DIY

1. Belum adanya relaksasi peraturan atas ketentuan calon debitur yang pernah mengakses Kredit Modal Kerja (KMK)/Kredit Investasi (KI) Komersial tidak dapat mengakses KUR, berpengaruh terhadap kinerja penyaluran KUR, karena sangat jarang calon debitur terutama calon debitur Skema KUR Kecil yang belum pernah bersinggungan dengan pembiayaan perbankan yang notabene merupakan KMK/KI Komersial.
2. Ketidaktahuan masyarakat yang mengakses pinjaman *online* dan *pay later* bahwa pinjaman tersebut masuk dalam Sistem Layanan Informasi Kreditur (SLIK) OJK sehingga berpengaruh dalam penilaian KUR.
3. Subsidi bunga KUR yang lambat dibayarkan ke bank mengakibatkan bank lebih fokus menyalurkan produk pembiayaan sendiri.
4. Kendala penhilan SIKP pada penyalur atas debitur yang telah melakukan pelunasan sehingga debitur kesulitan mengakses KUR pada penyalur lain khusus bagi debitur yang berpindah penyalur.

Berdasarkan hasil monev kredit program (KUR) Semester I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kanwil DJPb DIY, masih banyak penyalur yang mengenakan jaminan atas pinjaman KUR s.d. Rp 100 juta walaupun nilai jaminan tidak sebesar nilai pinjaman (hanya sebagai pemenuhan persyaratan pinjaman).

6. Belum optimalnya penggunaan data calon debitur potensial KUR yang diinput pemda digunakan oleh penyalur dalam penyaluran. Tingkat validitas NIK maupun nomor HP yang tidak aktif merupakan beberapa penyebab debitur sulit dihubungi maupun gagal dalam mengakses KUR



KENDALA PENYALURAN UMi DI DIY

1. Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan pembiayaan UMi kalah bersaing dengan produk sejenis yang notabene lebih menarik (bunga rendah, tidak menggunakan jaminan) seperti KUR Supermikro, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB), dan program penguatan modal oleh Pemda (Pemda Kab Sleman dengan suku bunga 3%)
2. Ketidaktahuan debitur UMi atas berbagai produk pembiayaan yang diakses (memiliki berbagai pinjaman pada koperasi) berdampak terhadap penolakan terutama bagi debitur UMi yang akan mengakses KUR

Kanwil DJPb DIY telah menginisiasi proses integrasi SiBakul Jogja dengan SIKP sejak tahun 2022. *Launching* Integrasi SIKP dan SiBakul Jogja dilakukan bersamaan dengan menyambut Bulan Inklusi Keuangan pada tanggal 23 Oktober 2024 sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemda DIY dan Ditjen Perbendaharaan.



Kanwil DJPb DIY menghadiri SiBakul Financetopia di Hotel Royal Ambarrukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman pada 23 Oktober 2024 yang digelar oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan di wilayah DIY.

Selanjutnya, pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi yang disaksikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Tri Saktiyana dan Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb, Darta untuk mengintegrasikan SIKP dan SiBakul.

Integrasi ini diharapkan akan membuka potensi yang lebih luas bagi para pelaku UMKM terhadap kredit usaha rakyat dengan tujuan agar UMKM di DIY bisa lebih berkembang dengan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau.

Perlu diketahui, kegiatan Sibakul Financetopia ini diikuti oleh 500 UMKM dan 16 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang ada di DIY. Acara ini diharapkan mampu mempererat kolaborasi dan sinergi yang terjalin di antara stakeholder terkait demi memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas UMKM serta memperluas inklusi keuangan di DIY dalam sisi akses, penggunaan, dan kualitas.

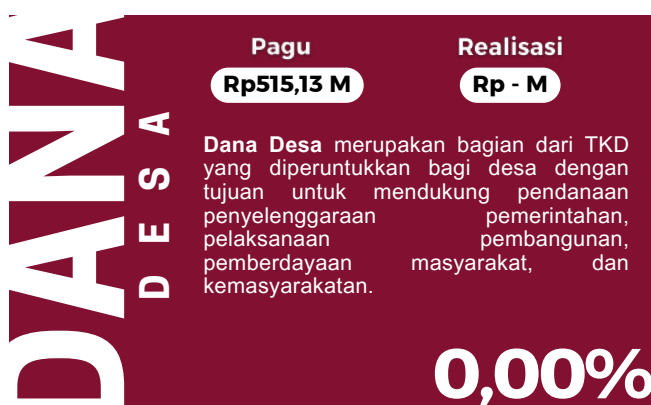
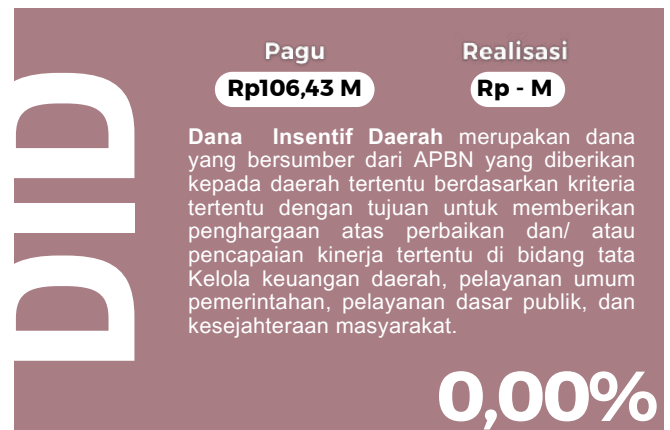
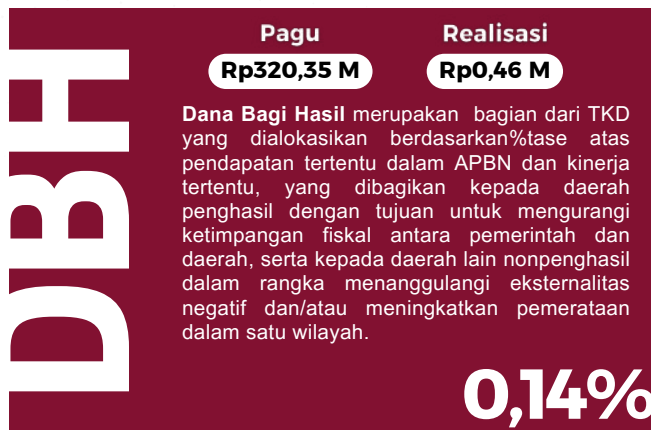
Sumber : Laporan ALCo Bulan Februari 2025





REALISASI TKDD D.I. YOGYAKARTA S.D. JANUARI 2025

Sumber : Laporan ALCo Bulan Februari 2025





P ERANAN FISKAL TERHADAP PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DIY

PENGENDALIAN INFLASI (STABILITAS HARGA)

Dukungan fiskal terhadap Pengendalian Inflasi dari belanja K/L pagu Rp6,33 miliar, blokir Rp0,12 miliar, belum ada realisasi. Alokasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perhubungan, antara lain untuk Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional) dan Publikasi/Laporan Statistik Harga.

PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Alokasi Dana APBN untuk penghapusan Kemiskinan Ekstrem di DIY support K/L dengan pagu Rp25,39 miliar, blokir Rp1,38 miliar, belum ada realisasi. Alokasi tersebut dilaksanakan oleh Kemenperind, Kemensos, dan Kementerian ATR/BPN, antara lain untuk Mahasiswa PTKI penerima KIP Kuliah, Akses Reforma Agraria, dan Pelatihan Wirausaha Industri.

PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

Alokasi APBN untuk penurunan prevalensi stunting melalui belanja K/L pagu Rp3,28 miliar, blokir Rp0,77 miliar, belum ada realisasi. Alokasi tersebut dilaksanakan oleh Kemenag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM, BKKBN, dan Kementerian ATR/BPN, antara lain untuk promosi produksi kelautan dan perikanan, penyelenggaraan Desa Pangan Aman dan Edukasi gizi bagi remaja.

Sumber : Laporan ALCo Bulan Februari 2025





Foto: Tim Media Resmi D.I. Yogyakarta

D.I. Yogyakarta: **Ekonomi dan APBN**

Kinerja Indikator Ekonomi Makro s.d. Januari 2025



Kebijakan fiskal pemerintah turut berperan dalam pencapaian indikator ekonomi makro DIY yang s.d. bulan Februari 2025 berdasarkan rilis BPS DIY adalah sebagai berikut:

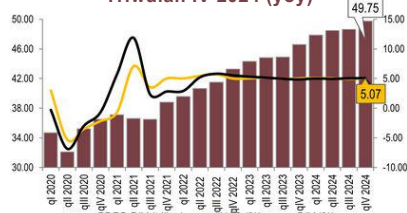
A Pertumbuhan Ekonomi | 5,07%

Ekonomi DIY tahun 2024 tumbuh tertinggi di Pulau Jawa, dengan pertumbuhan sebesar 5,03% (*c-to-c*). BPS Provinsi DIY mencatat kinerja ekonomi DIY Triwulan IV-2024 tumbuh 5,07% (*yoy*). Jika dibandingkan Triwulan III-2024 (*q-to-q*), perekonomian DIY Triwulan IV-2024 tumbuh 2,92%.

Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Sebagai penyumbang utama dari PDRB menurut pengeluaran adalah Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Konsumsi Rumah Tangga tumbuh, didorong oleh momen libur panjang dan cuti bersama selama tahun 2024. Pertumbuhan PMTB didorong oleh sejumlah Proyek Strategis Nasional di DIY selama tahun 2024.

PDRB DIY Triwulan I 2020 s.d. Triwulan IV 2024 (*yoy*)



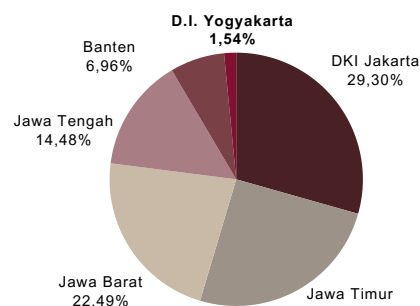
Sumber : BPS DIY

Semua lapangan usaha tumbuh positif pada periode ini. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Konstruksi. Sektor utama yaitu Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Pertanian, Informasi dan Komunikasi serta Konstruksi mampu memberikan kontribusi hingga lebih dari separuh perekonomian DIY sebesar 51,77%. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas, diikuti

oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Konstruksi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi DIY Tahun 2024 didorong oleh aktivitas domestik yang terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat, terjaganya daya beli masyarakat dengan dukungan kebijakan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas inflasi di bawah 3,00% sejak Januari 2024, serta surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut. Permintaan domestik yang masih kuat disertai dengan kenaikan UMP 2024, kenaikan APBD perubahan yang berdampak pada belanja pemerintah, serta masih berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, kinerja positif pada periode laporan tertahan oleh pengaruh dinamika ketidakpastian geopolitik di tengah konflik yang masih berlangsung.

Kontribusi PDRB Triwulan IV-2024 menurut Provinsi di Pulau Jawa



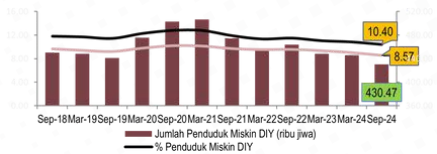
Sumber : BPS DIY

Kontribusi PDRB DIY baik terhadap Pulau Jawa maupun terhadap total 38 provinsi posisinya relatif kecil. Kontribusi terhadap Pulau Jawa sebesar 1,54%, dan kontribusinya terhadap total provinsi sebesar 0,88%. Pada Triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi DIY menempati posisi tertinggi dibandingkan provinsi lain se-Pulau Jawa, baik secara *q-to-q*, *yoy*, maupun *c-to-c*.



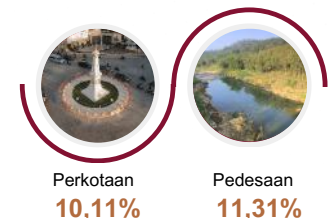
B Tingkat Kemiskinan | 10,40%

Kemiskinan DIY dan Nasional (dalam%; ribu jiwa) September 2018 s.d. September 2024



Angka Kemiskinan DIY menurun pada September 2024, dan merupakan terendah selama kurun waktu 6 (enam) tahun.

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase menurut Daerah Maret 2020 s.d. Sept 2024



Sumber : BPS DIY

Persentase penduduk miskin DIY September 2024 sebesar 10,40% dan turun 0,43% dibandingkan Maret 2024, dibandingkan Maret 2023, turun 0,64 persen. Jumlah penduduk miskin DIY September 2024 sebanyak 430.470 orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2024, terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 15.100 orang.

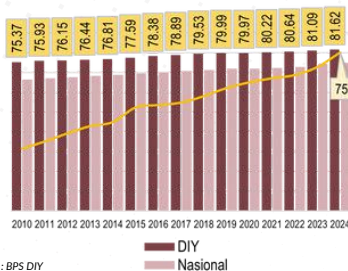
Persentase penduduk miskin perkotaan DIY September 2024 sebesar 10,11% dan turun 0,18% dibandingkan Maret 2024. Penduduk miskin pedesaan pada September 2024 sebesar 11,31% dan turun 1,18% dibandingkan Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2024 sebanyak 316.810 orang, turun sebanyak 2.600 orang dibandingkan Maret 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pedesaan pada September 2024 sebanyak 113.660 orang atau mengalami penurunan 12.500 orang dibandingkan Maret 2024.

C Indeks Pembangunan Manusia | 81,62

IPM DIY 2024 berada di posisi kedua secara nasional dengan nilai 81,62 berada di bawah DKI Jakarta sebesar 84,15. IPM DIY 2024 naik sebesar 0,65% lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan IPM nasional 2024 yaitu sebesar 0,85%. Peningkatan IPM DIY tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak.

Perkembangan IPM DIY - Nasional dan UHH DIY Tahun 2010 s.d. 2024



Sumber: BPS DIY

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) mencapai Rp15,36 juta meningkat sebesar 2,93%. Rata-rata pengeluaran riil per kapita masyarakat DIY mengalami kenaikan Rp437.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret 2024.



Dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), menunjukkan bahwa kualitas kesehatan mengalami peningkatan. Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,36 tahun meningkat 0,18 tahun atau 0,24% dibanding mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data UHH berasal dari hasil SP2020 Lanjutan (Long Form SP2020).

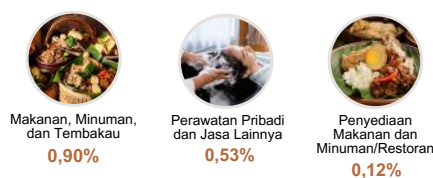
Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas di DIY tahun 2024 mengalami peningkatan. HLS meningkat sebanyak 0,04 tahun atau 0,26% dibandingkan tahun sebelumnya (dari 15,66 tahun menjadi 15,70 tahun) dan RLS meningkat sebesar 0,09 tahun atau 0,92% dari 9,83 tahun menjadi 9,92 tahun. Data HLS dan RLS bersumber dari hasil Susenas Maret 2024.



D Perkembangan Inflasi | 0,95%

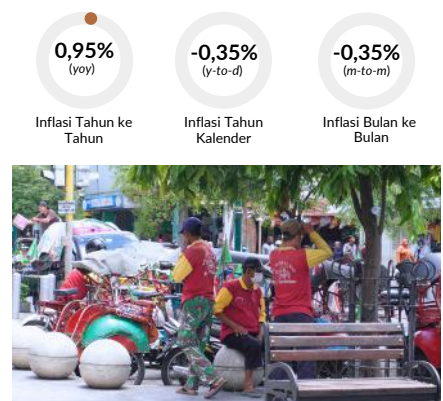
Pada Januari 2025 terjadi inflasi sebesar 0,95% (yoy), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,24. Tingkat deflasi mtom sebesar 0,35% dan tingkat deflasi ytod sebesar 0,35%. Inflasi di Kota Yogyakarta sebesar 1,30% (yoy) dengan IHK 107,17 sementara di Kab. Gunungkidul sebesar 0,64% (yoy) dengan IHK 105,47. Penyumbang utama inflasi secara yoy adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,90%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,53%. Sedangkan penyumbang utama deflasi bulan Januari 2025 secara mtom adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,15%.

Penyumbang Inflasi



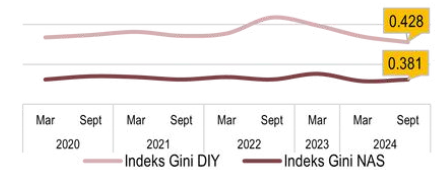
Sumber: BPS DIY

Perkembangan Inflasi



E Tingkat Ketimpangan | 0,428

Perkembangan Gini Ratio di DIY dan Nasional, Maret 2020 s.d. September 2024



Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY September 2024 yang diukur dengan angka Gini Rasio DIY sebesar 0,428 dan turun 0,007 poin jika dibandingkan Maret 2024 yang besarnya 0,435. Angka tersebut juga lebih tinggi dari angka rata-rata nasional sebesar 0,381 sekaligus menjadikan DIY sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi kedua bersama dengan Jawa Barat, sedangkan yang tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,431.

Gini Rasio DIY di daerah perkotaan September 2024 sebesar 0,429 turun dibanding gini rasio Maret 2024 yang sebesar 0,440. Sementara itu, gini rasio di daerah perdesaan pada September 2024 sebesar 0,355. Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan gini rasio Maret 2024 yang besarnya 0,349 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan gini rasio Maret 2023 yang sebesar 0,362.

Perkembangan Gini Ratio di daerah Perkotaan dan Pedesaan



Sumber: BPS DIY

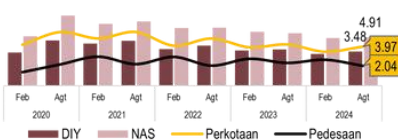


Disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan signifikan yang mencapai 1,21 poin, meskipun tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan sudah lebih rendah dari level sebelum pandemi.

F Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,48%

Keadaan TPT DIY selama enam tahun terakhir berada pada kisaran 3,18% s.d. 4,57%, dan selalu berada di bawah TPT nasional pada kisaran 4,91% s.d. 7,07%.

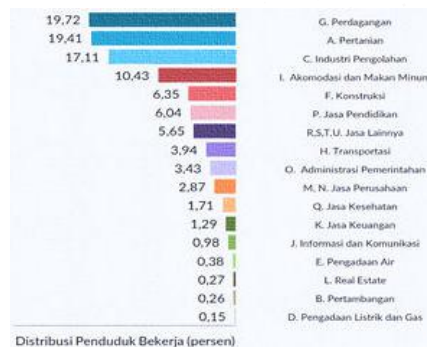
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY, Feb 2020 s.d. Feb 2024 (persen)



TPT DIY Agustus 2024 sebesar 3,48% mengalami penurunan 0,21% dibanding Agustus 2023 (3,69%).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan pada Agustus 2024 sebesar 3,97%, sedangkan TPT di daerah perdesaan sebesar 2,04%. Dibandingkan Agustus 2023, baik TPT di daerah perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,22% untuk perkotaan dan 0,29% untuk perdesaan.

Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Agustus 2024 (yoy)



Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama DIY Agustus 2022 s.d. 2024 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu

perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja DIY paling banyak berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yakni sebesar 43,40%. Terbesar kedua yaitu berusaha sendiri (20,81%) diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (14,01%).

Penyerapan tenaga kerja di DIY didominasi oleh penduduk bekerja dengan pendidikan SMK sebanyak 546.580 orang (25,04%), diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 543.640 orang (24,91%).

Sumber : BPS DIY



Panorama Jogja



Lokasi: Wedang Kopi Prambanan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah

“Nuladha Laku Utama”

Contohnya perbuatan baik dan mulia

MELIHAT PROSPEK PARIWISATA DIY DAN TANTANGANNYA DI TAHUN 2025

"Dengan banyaknya potensi objek wisata di Yogyakarta serta dukungan infrastruktur penunjang seperti transportasi hingga akomodasi, maka kita patut optimistis bahwa pariwisata Jogja akan meningkat kualitasnya dan terus berkembang menuju ke arah positif pada tahun 2025. Tentu hal itu bisa terjadi dengan sejumlah syarat."

Joko Sumarsono, S.E.

(Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Kanwil DJPb Provinsi DIY)

Selain dikenal sebagai Kota Pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang biasa disebut Jogja juga identik dengan pariwisata. Banyak sekali objek wisata ikonik di Jogja yang selalu melekat di hati pengunjungnya, mulai dari Malioboro, Keraton Yogyakarta, Kaliurang, Pantai Parangtritis hingga Candi Prambanan. Bahkan, Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tetap diidentikkan dengan Jogja.

Tak hanya itu, sekarang banyak bermunculan objek wisata baru di wilayah Jogja yang tentu saja sayang untuk dilewatkan, misalnya Heha Sky View, Tebing Breksi, Studio Gamplong serta deretan objek wisata baru di pesisir pantai selatan yang terbentang dari Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul. Objek-objek wisata tersebut telah menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Jogja.



Berdasarkan data BPS yang dirilis pada tanggal 5 Februari 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Jogja sepanjang tahun 2024 mencapai 38,13 juta orang yang terdiri atas 103.064 wisatawan mancanegara atau 0,27% dan 38,03 juta wisatawan dalam negeri atau 99,73%. Rata-rata tingkat hunian hotel mencapai 55,68% untuk hotel bintang dan 24,58% untuk hotel nonbintang. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu hotel adalah 1,52 malam untuk hotel bintang dan 1,17 malam untuk hotel nonbintang.

Kunjungan wisatawan dalam negeri tersebar di seluruh kabupaten dan kota di DIY dengan rincian Kabupaten Bantul 621.235 wisatawan atau 16,61%, Kabupaten Gunungkidul 540.192 wisatawan atau 14,44%, Kabupaten Kulon Progo 198.143 wisatawan atau



5,30%, Kabupaten Sleman 1,4 juta wisatawan atau 37,45%, dan Kota Yogyakarta 979.975 wisatawan atau 26,20%. Jumlah kunjungan wisatawan ke masing-masing kabupaten/kota tersebut berbanding lurus dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota dari sektor pariwisata berdasarkan data dari Dinas Pariwisata pada 5 daerah tersebut. Rinciannya, Kabupaten Bantul Rp30,6 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp33,1 miliar, Kabupaten Kulon Progo Rp7,37 miliar, dan Kabupaten Sleman Rp346,99 miliar.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan pariwisata di Jogja mengalami berbagai macam dinamika sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 61.430 orang, mengalami penurunan sebesar 81,87% dibanding tahun 2019 sebanyak 338.858 orang. Sedangkan jumlah wisatawan dalam negeri sebanyak 1,3 juta orang atau turun 61,73% dibanding tahun 2019 orang yang mencapai 3,38 juta wisatawan. Penurunan kunjungan wisatawan tersebut tidak terlepas dari adanya Pandemi Covid-19.

Di tahun 2021, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 14.201 orang yang juga mengalami penurunan 77% dibanding tahun 2020 yang mencapai 61.430 orang. Sedangkan jumlah wisatawan dalam negeri sebanyak 3,11 juta orang atau naik 140% dibanding tahun 2020 yang mencapai 1,3 juta wisatawan. Penurunan kunjungan

wisatawan mancanegara tidak terlepas dari adanya pembatasan perlintasan antarnegara akibat Pandemi Covid-19. Sementara kunjungan wisatawan dalam negeri mengalami kenaikan karena sudah adanya pelonggaran atas pembatasan kegiatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Kondisi mulai membaik di tahun 2022, di mana jumlah wisatawan mancanegara mencapai 42.201 orang atau mengalami peningkatan 37,30% dibanding tahun 2021 yang sebanyak 14.201 orang. Sedangkan jumlah wisatawan dalam negeri sebanyak 4,9 juta orang, mengalami peningkatan 87,70% dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,11 juta orang. Kenaikan berlanjut di tahun 2023 ketika jumlah wisatawan mancanegara menyentuh angka 126.198 orang atau 199% dibanding tahun 2022 yang sebanyak 42.201 orang. Sedangkan jumlah wisatawan dalam negeri sebanyak 5,42 juta orang atau naik 1,06 % dibanding tahun 2022 yang menyentuh angka 4,9 juta orang.



Perlu kita akui, pariwisata merupakan sektor ekonomi yang tidak pernah berdiri sendiri. Keberadaan industri pariwisata selalu beriringan dengan sektor transportasi, akomodasi



penginapan, kuliner, industri kecil souvenir dan oleh-oleh serta pelaku seni budaya. Sektor transportasi diperlukan oleh wisatawan untuk menuju objek wisata, baik melalui transportasi darat, laut maupun udara. Tidak ketinggalan pula pentingnya kehadiran transportasi lokal di daerah lokasi wisata tersebut.

Akomodasi dan penginapan juga diperlukan oleh wisatawan yang datang berlibur dalam waktu yang lebih dari satu hari. Lalu, mayoritas wisatawan dipastikan turut berburu kuliner ketika mereka berwisata sehingga kehadiran rumah makan atau pun sentra kuliner di sekitar lokasi wisata pasti menarik minat mereka. Bahkan untuk saat ini, keberadaan rumah makan atau sentra kuliner bisa menjadi salah satu objek wisata itu sendiri dengan tajuk wisata kuliner.

Selain sentra kuliner, oleh-oleh khas objek wisata tersebut, baik berupa souvenir, cendera mata maupun makanan ringan khas daerah setempat menjadi buruan wisatawan. Di situ lah industri pengolahan makanan ringan atau pun souvenir kerajinan tangan dapat tumbuh dan berkembang. Apalagi jika objek wisata menampilkan pertunjukan seni budaya yang melibatkan para pelaku seni dan budaya, sehingga para pekerja seni dapat memperoleh penghasilan dari kehadiran para wisatawan tersebut. Hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat setempat.

Melihat tren kunjungan wisatawan ke Jogja yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, khususnya setelah Pandemi Covid-19, maka dapat dilihat adanya optimisme bahwa sektor pariwisata Jogja akan terus tumbuh dan meningkat di tahun 2025 ini. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin banyak dan bervariasi objek wisata di Jogja beserta infrastruktur penunjangnya,

khususnya akomodasi hotel dan penginapan. Selain itu kehadiran Bandara Adisucipto di Sleman dan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo turut mendukung Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Di Jogja juga terdapat dua stasiun yang terletak di pusat kota Yogyakarta, yaitu Stasiun Yogyakarta yang sering disebut Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Tak hanya itu, Jogja juga memiliki terminal bis antarkota, yaitu Terminal Giwangan.

Saat ini juga sedang dibangun tiga infrastruktur jalan yaitu dua jalan tol dan satu jalan nontol untuk menunjang kemudahan akses ke Yogyakarta. Jalan tol yang dibangun adalah Tol Jogja-Solo yang sebagian ruasnya sudah beroperasi serta Tol Jogja-Bawen. Sedangkan ruas jalan nontol adalah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang akan menghubungkan jalur selatan Pulau Jawa dari Banten sampai Jawa Timur. Keberadaan infrastruktur jalan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan jumlah kunjungan wisatawan ke Jogja.

TANTANGAN PARIWISATA YOGYAKARTA



Dari sekian banyak sarana pendukung tersebut, pariwisata di Jogja masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dipecahkan bersama oleh para pemangku kepentingan yaitu kemacetan dan sampah. Sudah menjadi rutinitas di Jogja, kemacetan terjadi hampir di semua ruas jalan di Jogja ketika memasuki masa-masa libur panjang misalnya Lebaran, Nataru atau *long weekend* akibat meningkatnya

jumlah wisatawan yang datang ke Jogja. Meskipun kemacetan sudah menjadi “penyakit” rutin, namun sampai saat ini belum ada solusi konkret yang dapat memecahkannya.

Permasalahan berikutnya adalah sampah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kunjungan wisatawan menjadi salah satu pemicu peningkatan sampah di Jogja. Kondisi tersebut menjadi semakin parah dengan adanya penutupan permanen TPS Piyungan oleh Pemerintah Provinsi DIY dan belum maksimalnya penanganan sampah oleh masing-masing kabupaten dan kota di Jogja. Hal itu menimbulkan sebuah fenomena adanya tumpukan sampah liar di pinggir-pinggir jalan dan di depo-depo akibat sampah dari wisatawan atau pun dari masyarakat setempat. Sampah-sampah tersebut tentu akan merusak citra Jogja sebagai kota wisata.

Dengan banyaknya potensi objek wisata di Jogja serta dukungan infrastruktur penunjang seperti transportasi hingga akomodasi, maka kita patut optimistis pariwisata Yogyakarta akan meningkat kualitasnya dan terus berkembang menuju ke arah positif pada tahun 2025. Tentu dengan syarat jika masyarakat Yogyakarta beserta jajaran pemerintahnya bisa mengelola dengan baik semua komponen yang terlibat beserta masalah yang muncul akibat aktivitas pariwisata.





DIY INGIN MEMILIKI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG SETTLE DAN KONTINU, BUKAN SEKADAR TUMBUH DALAM JANGKA PENDEK

"Dengan semua modal yang dimiliki DIY membuat kita harus optimistis, namun harus tetap waspada dan berhati-hati terutama terhadap faktor eksternal. Ke depan, kita ingin memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan settle, bukan karena dorongan suatu proyek jangka pendek."

Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST., MT
(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY)



Menghadapi tahun 2025, prospek perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak terlepas dari dinamika ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan. Ketidakpastian ekonomi dunia akibat ketegangan geopolitik yang masih akan berlanjut, fluktuasi harga komoditas serta dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor perekonomian menjadi faktor eksternal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Di tingkat nasional, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan daya saing industri serta memastikan pemerataan pembangunan di tengah perubahan kebijakan ekonomi pasca-Pemilu 2024. Semua faktor ini akan berpengaruh terhadap kondisi investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat di DIY.

Untuk memahami lebih dalam bagaimana DIY merespons tantangan tersebut dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada, kami berkesempatan mewawancarai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Ibu Ni Made Dwipanti Indrayanti. Dalam wawancara ini dibahas berbagai arah kebijakan daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, upaya mendorong investasi di sektor prioritas serta strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal. Selain itu, kita juga diajak melihat bagaimana DIY mengantisipasi perubahan kebijakan nasional dan global agar tetap menjadi daerah dengan perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tahun 2025 menuju target pertumbuhan 6% pada tahun 2026 nanti.



Pada triwulan IV 2024, DIY tumbuh 5,07% yoy, sedikit di atas nasional yang sebesar 5,02%. Bagaimana evaluasi pemda DIY atas capaian tersebut?

“Nggih, terima kasih. Bicara tentang capaian triwulan IV 2024 ya, kalau dari sisi pertumbuhannya kita cukup bagus. Dalam artian tidak ada yang berkontraksi seperti saat Pandemi Covid-19 lalu. Tetapi kalau berdasarkan dokumen perencanaan, memang target kita di 2024 itu secara c-to-c 5,1% s.d. 5,6%, kita kan di 5,03%. Jadi walaupun target tersebut tidak tercapai tetapi pertumbuhan DIY tertinggi di Pulau Jawa.”

Apa yang masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2024 tersebut? Apakah DIY memang masih bertumpu pada sektor pariwisata dan pendidikan atau ada sektor baru yang cukup potensial?

“Saya kira kalau kita bisa mengevaluasi seluruh sektor PDRB, secara umum naik secara positif tetapi memang ada yang mendominasi atau sebagai unggulan. Pertama, tentu Industri Pengolahan. Saya kira ini wajar ya karena sektor ini sangat mendukung Pariwisata dan Jasa Pendidikan di DIY. Kemudian Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebagai trigger dari pariwisata, diikuti Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan selanjutnya Informasi dan Komunikasi yang terdorong penggunaan IT di seluruh sektor. Konstruksi juga tumbuh karena adanya Program Strategis Nasional (PSN) di DIY yaitu pembangunan jalan tol dan Jembatan Pandansimo. JJLS kita juga sudah selesai dan tinggal dimanfaatkan, sisa Kelok 23 di Parangtritis yang masih on progress. Saya kira sektor-sektor ini yang kemudian memberikan warna pertumbuhan ekonomi DIY di tahun 2024.”

Bagaimana dengan perkembangan Sektor Pariwisata selaku core secara umum?

“Kondisi Sektor Pariwisata DIY itu sudah bagus pertumbuhannya dan yang terpenting memberikan multiplier effect bagi banyak sektor lain. Sebenarnya ketika bicara pariwisata kita tidak hanya bicara

dari Sektor pariwisatanya saja, tetapi juga Sektor Produksi, Sektor Transportasi serta Akomodasi Makan dan Minum. Sektor-sektor itu nanti akan otomatis mengikuti pertumbuhan Sektor Pariwisata. Kondisi DIY yang stabil dari sisi keamanan juga mendorong wisatawan terus berdatangan, meskipun masih didominasi wisatawan lokal. Kita memang masih perlu menarik kedatangan wisatawan mancanegara ke DIY.”

Apakah pariwisata DIY yang bertumpu wisata alam seperti pantai dan gunung terpengaruh dengan kondisi perubahan iklim sehingga mempengaruhi jumlah kehadiran wisatawan?

“Saya kira kan begini ya. Karakteristik DIY itu unik. Wilayah kita secara luas di Pulau Jawa paling kecil di paling pojok selatan berbatasan juga dengan samudra. Jadi secara geografis, ancaman bencana selalu ada, tetapi alhamdulillah kita selalu mengusahakan tindakan preventifnya. Namun terkait dengan pariwisata itu sendiri, kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pariwisata di DIY. Pariwisata DIY itu cukup unik dengan budaya yang mewarnai. Ini juga menjadi daya tarik yang kuat bagi wisatawan. DIY dengan kreativitas SDM yang luar biasa menjadi bagian dari daya tarik wisata itu sendiri. Selain itu, kita punya alam yang sangat indah dan unik. Gumuk Pasir yang kita miliki misalnya, itu sangat khas dan unik cuma ada dua di dunia. Kita juga punya Gunung Api Purba yang memiliki keunikan alam yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jadi berkaitan dengan perubahan iklim, saya kira tidak berpengaruh ya. Tergantung kita nanti bisa memberikan warning sebagai tindakan preventif terkait faktor alam ini.”

Bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di DIY yang dianggap banyak pihak punya potensi sangat besar?

“DIY memang gudangnya berbagai macam kreativitas. Ini potensi besar

kita. Kita punya budaya yang khas. Ekonomi kreatif itu kan bentuknya bermacam-macam, ada 17 sektor ekonomi kreatif. Kuliner misalnya, ini menjadi potensi wisata tersendiri juga. Wisatawan tentu berpikir, “kalau hujan ya gak usah ke pantai, wisata kuliner saja”. Selain kuliner, ada juga seni, *fashion*, dan kriya. Jadi 17 sektor ekonomi kreatif tadi tumbuh bagus di DIY. Jangan lupa kita juga punya teknologi yang ikut menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Ekosistem teknologi kita luar biasa, tumbuh dengan sangat bagus di DIY. Kami sudah berkomunikasi dengan *stakeholder* yang berkecimpung dalam dunia teknologi di DIY. Sebentar lagi akan ada sesuatu yang boom dari DIY yang akan memberikan warna baru bagi ekonomi kreatif di DIY. RPJMN 2025-2029 untuk Pulau Jawa itu juga menargetkan DIY sebagai pusat terkait ekonomi kreatif.”



Terkait interkoneksi pariwisata antardaerah seperti jalur Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, bagaimana progresnya saat ini?

“Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP) itu kan salah satu bagian dari destinasi super prioritas dan masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Harapan besar kami dengan program BYP ini bukan hanya berkaitan dengan ketiga tempat itu saja. Misalnya kok Kulon Progo dan Gunungkidul tidak disebut, tetapi nanti tetap akan ber-impact ke wilayah itu sebenarnya. Ketika bicara Borobudur, kita membicarakan desain akses yang saling terkoneksi. Ketika bicara desain *exit* tol yang ada, nanti tol Solo-Yogyakarta *exit*-nya akan terhubung dengan jalan akses dari

Temon ke Borobudur. Berarti sebenarnya dampak BYP itu diharapkan menyebar ke wilayah di sekitarnya termasuk wilayah-wilayah di DIY.”

Kalau melihat rilis BPS, konstruksi menyumbang pertumbuhan tertinggi di triwulan IV 2024 dan salah satunya karena pembangunan ruas tol. Bagaimana pendapat Ibu terkait peluang proyek infrastruktur ini untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026?

“Target pertumbuhan ekonomi 2026 di RPJMD memang 6%. Sebenarnya jujur angka itu cukup berat. Nah untuk target 6% ini harapan besar kami memang proyek infrastruktur yang bisa menjadi pendorongnya. Meskipun ketika kita bicara konstruksi, karakteristik proyek jalan tol tentu berbeda dengan pada saat kita membangun Bandara YIA. Sejarah DIY menembus pertumbuhan ekonomi 6% itu ya pada saat membangun YIA itu. Harapan kami bahwa infrastruktur ini memang masih menjadi *trigger*-nya, meskipun impactnya tidak sebesar waktu pembangunan Bandara YIA. Kami ingin pertumbuhan ekonomi itu konsisten, tidak fluktuatif sehingga stabilitas lebih terjaga atau tumbuh terus meskipun lonjakannya tidak langsung tinggi. Sisi lain yang tidak kalah penting adalah penyiapan SDM agar ketika proyek infrastruktur itu sudah bisa digunakan, masyarakat bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi ada

pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan seiring dengan pemanfaatan suatu infrastruktur baru. Ini kan masih menjadi PR ya. Contoh Kulon Progo, kurang apa dari segi infrastruktur? Ada bandara, stasiun, jalan tol, jalan nasional, tetapi kemiskinan dan ketimpangan wilayah di sana masih tinggi.”

Berarti penting sekali untuk mempersiapkan mentalitas masyarakat pada saat pembangunan infrastruktur?

“Tepat sekali. Pada saat ada PSN di DIY atau atau proyek-proyek yang memicu pertumbuhan ekonomi, kita perlu menyiapkan masyarakatnya agar mampu beradaptasi, mampu memanfaatkan infrastruktur itu seperti apa. Misalnya memperkuat Pokdarwis (kelompok sadar wisata), membuat desa wisata atau membangun UMKM-nya. Orang mau mampir kalau kita punya jalan tol yang terkoneksi dengan aspek pendukung tadi. Jadi tidak direct saja dari titik A ke titik B tetapi ketika daerah yang dilewati punya daya tarik tertentu atau spesifikasi tertentu, saya kira ini sangat bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Contohnya seperti JJLS ya. Sekarang jalan sudah sangat nyaman untuk dilalui, tinggal bagaimana kita menghidupkan sisi-sisinya. Tetapi tidak bisa kemudian kita biarkan itu berkembang sendiri, perlu kita atur dengan perda tata ruang sampai ke rencana detail tata





ruang karena dengan analisis tata ruang itu kita sudah memper-timbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apa fungsi-fungsi yang perlu dilindungi, apa fungsi-fungsi yang bisa dikembangkan.”

Bagaimana dengan Sektor Pertanian di DIY ke depan?

“Kalau Sektor Pertanian saya yakin sudah survive dan settle. Hanya persoalannya dari sisi pertanian ini kendalanya kepemilikan lahan pertanian di DIY itu kecil-kecil. Taruhlah luasnya 500 meter persegi per orang. Jadi hasilnya hanya untuk konsumsi pribadi, kalau sisa ya dibagi ke tetangga. Jadi kalau kita bicara produktivitas, dulu pernah ada namanya *integrated farming* atau menyatukan galengan sawah agar pengelolaannya menjadi lebih efisien dan skala ekonominya meningkat. Pertanian itu kan sebenarnya pengolahan lahan 500 meter persegi dengan yang hektaran itu sama saja. Apalagi kalau ke depan dukungan teknologi semakin kuat. Ini kan salah satu yang selalu Bapak Gubernur sampaikan kepada kita, agar agraris ini menjadi industrial. industrial bukan yang gimana-gimana, tapi produk agraris ini tidak hanya menjadi konsumsi lokal tapi juga menjadi bahan untuk diekspor baik untuk di luar wilayah maupun di luar negeri. Namun *mindset* petani DIY tentu masih perlu diubah.”

“Misalnya terkait *integrated farming* tadi dikhawatirkan akan berben-turan dengan berbagai aspek seperti hak waris. Padahal dengan perkembangan teknologi itu bisa diatur dengan mudah termasuk batas-batas titik koordinatnya. Kita



juga bicara mengenai Undang-Undang PLP2B. Jadi kalau itu sudah masuk di pengaturan tata ruang bahwa lahan itu menjadi bagian dari PLP2B sampai kemudian ada pendetailan bahwa lahan itu tidak boleh dialihfungsikan, saya kira tidak akan ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan kita itu luar biasa, setahun itu bisa 200 hektare beralih dari sawah ke perumahan, ruko-ruko, dll. Makanya sekarang ada juga program dari pemerintah “cetak sawah baru” untuk mengganti lahan pertanian yang hilang mengalami alih fungsi lahan.”

Bagaimana dengan link and match Sektor Pertanian dengan Sektor Industri agar supply pertanian ke industri bisa sepanjang tahun?

“Betul sekali, Bapak Gubernur selalu menekankan kalau pertanian suplainya musiman agak susah pengaturannya. Akhirnya terjadilah inflasi. Kalau masa panen raya juga jatuh harganya, harga cabai, gabah, dan bawang merah yang biasanya seperti ini. Coba kalau kita bicara di luar negeri, pernah gak bicara tentang panen raya? Tidak ada. Karena mereka bicara tentang produktivitas itu dari Januari sampai Desember, satu tahun penuh. Kalau kita enggak, masih mengumpul di periode tertentu sehingga disebut panen raya. Jika alasannya musim, sekarang kondisi musim juga tidak menentu sehingga *treatment*-nya perlu melibatkan BMKG untuk mendidik petani kita agar meleak perubahan iklim. Tetapi pengaturan suplai sepanjang tahun ini yang harus dilakukan. Aspek lain yang perlu dipikirkan adalah optimalisasi lahan kritis atau lahan marginal. Ke depan kita perlu meneliti komoditas apa yang cocok untuk lahan kritis ini agar bisa menjadi bagian suplai yang kontinu dari Sektor Pertanian.”

Terkait dengan ekspor, salah satu keluhan eksportir ketika melalui Bandara YIA adalah cost of logistics-nya yang dianggap terlalu tinggi sehingga akhirnya mereka memilih melalui Tanjung

Mas atau tempat lain. Bagaimana tanggapan Ibu?

“Terkait ekspor ini, pertama, kita memang perlu punya inline port, yang kedua adalah terminal angkutan barang yang dekat dengan rel kereta. Jadi kita bicara jarak itu sebenarnya sudah tidak bisa diukur lagi dan efisiensi ekonomis itu sangat mungkin melalui rel untuk angkutannya. Makanya dulu sudah ada inisiasi, bagaimana membuat terminal angkutan barang yang terintegrasi dengan jalan nasional sehingga akses bisa lebih mudah dan langsung. Terkait *cost* tadi, kita akui memang masih tinggi. Saya juga menerima keluhannya. Harapan besar kami di Bandara YIA bisa ada kargo-kargo besar karena lahan di Kulon Progo itu kan tersedia. Saya bilang gini, oke sekarang kita bertemu dulu nih dengan pengelola Bandara YIA, dia mau seperti apa, kemudian ada jaminan bahwa ini *continue* dan *sustain*. Kita bicara privilege untuk barang-barang yang mau diekspor. Kemudian yang juga penting, jumlah *direct flight* pesawat terutama menuju ke negara tujuan ekspor. Sekarang kan baru Malaysia dan Singapura. Bapak Gubernur minta ada 4 lagi tambahan untuk *direct flight* ini, Bapak Gubernur juga meminta kami untuk menganalisis terkait hal ini. Nah untuk itu kita perlu untuk duduk bersama dengan semua *stakeholders*. Aspek penting lainnya adalah optimalisasi kawasan industri. Kita punya Kawasan Industri Piyungan dan Kawasan Industri Sentolo yang harus kita optimalkan terutama untuk mendukung ekspor.”

Terkait pelabuhan tadi, bagaimana rencana Pelabuhan Tanjung Adikarto? Sudah mutlak dihentikan atau nanti akan ada opsi pembangunan yang lain?

“Mungkin nanti akan dilakukan alih fungsi saja, karena untuk menjadi pelabuhan juga tidak memungkinkan. Sedimentasinya cukup besar sehingga operasional

untuk mengeruk itu saja sudah butuh miliaran dalam satu tahunnya. Untuk yang di wilayah selatan, kita kan juga punya Pelabuhan Sadeng dan Pelabuhan Gesing. Pelabuhan Gesing yang kemarin baru di-launching oleh Bapak Gubernur itu menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan produksi perikanan. Sedangkan Pelabuhan Sadeng sangat berpotensi menarik minat kapal-kapal besar berukuran 15 gross tonnage ke atas untuk mau bersandar. Cuma memang harus ada fasilitas-fasilitas tambahan, termasuk pembentukan kawasan industri perikanan di sekitar Pelabuhan Sadeng dan adanya *cool storage* yang memadai. Jadi sisi selatan DIY itu sangat potensial untuk pengembangan *blue economy*. Ketika berbicara *blue economy* itu kita punya sumber daya laut yang besar. Ini juga yang sebenarnya kita sounding ke teman-teman di Gunungkidul, Ayo mari kita sama-sama ajukan program ini ke pemerintah pusat sebagai pemicu pertumbuhan di wilayah selatan.”

Terkait investasi, kira-kira strategi apa yang dilakukan Pemda DIY untuk menarik investor datang?

“Kalau kemudahan investasi itu tentu pertama terkait perizinan, kemudian dari sisi penjaminan bahwa kemudian mau investasi di mana akan ada support dari pemda di wilayah itu baik SDM, dukungan energi maupun bahan bakunya. Saya mendapatkan tugas untuk pengembangan Aerotropolis Bandara YIA. Ke depan kalau kita desain Aerotropolis, harapannya bisa menjadi *trigger* bagi sekelilingnya. Makanya ada empat

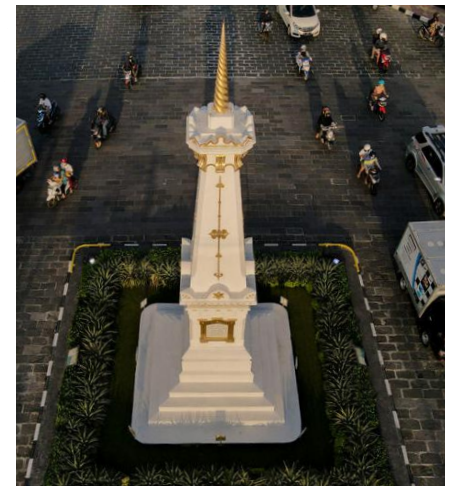


desain yang dibuat yaitu MICE, *Smart Agriculture*, *Smart Tourism* yang dibagi dua *ocean* dan *mountain* serta *Science Techno City* dengan adanya universitas seperti UNY dan UGM yang *field research center*-nya ada di Sentolo. Kemudian kami petakan bahwa lahan-lahan yang diperlukan tadi itu secara status banyak sekali kepemilikan pribadi. Masyarakat kita perlu ada edukasi juga. Kalau menurut kami, ketika ada infrastruktur besar tidak harus tanahnya dijual meskipun mereka bisa mendapatkan banyak uang. Tetapi mereka tidak berpikir jangka panjang. Nah ini yang kami selalu sounding kepada masyarakat. Ayo kita ramah investasi, ramah investasi itu bagaimana? Boleh saja tanah itu dikerjasamakan tanpa dilepas statusnya. Kan ini *win-win solution*. Ada kegiatan ekonomi di situ, dia masih punya aset, kawasan itu tumbuh berkembang, anak cucunya tetap bisa menikmati. Itu kalau kita bicara dalam jangka panjang.”

Bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi antara DIY bagian utara dengan selatan saat ini? Apa saja perencanaan ke depan terkait hal ini?

“Terkait ketimpangan DIY bagian utara dan selatan, kita sudah membuka jalur untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk bermobilisasi. Kemudian ada juga berbagai program seperti Desa Maritim, Desa Budaya, dan Desa Mandiri Budaya yang membuat kreativitas di wilayah-wilayah ini tumbuh dan berkembang. Saya kira kita akan terus menjaga itu. Untuk masalah ketimpangan wilayah ini kita tidak akan bisa mengadopsi aktivitas ekonomi yang ada di sisi utara dan kita pindahkan ke selatan. Tidak akan bisa karena karakteristik wilayahnya sangat berbeda. Makanya tadi saya menyinggung *blue economy* dan *green economy* yang potensial di wilayah selatan. Termasuk juga kita tetap menjaga perlindungan sosial untuk

melindungi masyarakat karena kesenjangan ini kan termasuk juga kesenjangan pendapatan.”



Dengan berbagai modalitas DIY tersebut, apa yang masih perlu dipersiapkan untuk mencapai target perekonomian 2025 ini?

“Kita punya banyak potensi terutama ekonomi industri kreatif. Tinggal bagaimana kita kemudian memanfaatkan itu dan mendorong masyarakat ada keterlibatan di situ. Selain sektor-sektor utama yang telah saya sebutkan seperti Industri Pengolahan, kemudian Akomodasi Dan Makan Minum kan sekarang terus tumbuh. Kita sekarang lihat semakin luar biasa pariwisatanya DIY. Hotel, *homestay* sangat berkembang. Hanya kita kan sebenarnya tidak semata-mata butuh banyak orang datang tetapi butuh *long of stay* dan spending money-nya. Kita butuh itu, kita enggak butuh banyak orang yang one day tour ke DIY tetapi tidak membawa manfaat karena catering bawa sendiri, bahkan meninggalkan sampah saja. Makanya ini yang perlu kita atur bersama. Sebenarnya kan ketika bicara industri pariwisata tidak hanya terkait pariwisatanya saja, tetapi juga sektor yang lain juga. Pariwisata harus didukung semua sektor terkait seperti pendidikan untuk SDM-nya, UMKM, dan regulasi agar berjalan tertib.”

Berarti secara umum bagaimana tone untuk menuju target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026?



“Kalau kita bicara bagaimana mewujudkan target pertumbuhan ekonomi tersebut, saya sambil berdiskusi dengan banyak orang, kira-kira kita optimistis enggak ya target 6% di tahun 2026 itu? Biasanya kita juga deg-degan, hehe. Tetapi tadi ya, kalau dari instrumen pertumbuhan ekonomi kalau kita bicara belanja pemerintah sudah tidak mungkin menjadi tumpuan mengingat efisiensi yang dilakukan. Kemudian pendapatan masyarakat walaupun berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan tetap kita jaga, dalam artian ini kan berkorelasi dengan kemiskinan. Bagaimana kemiskinan itu kita kurangi dengan perbaikan terutama dari sisi SDM-nya. Kemudian dari sisi bagaimana pengolahan potensi di wilayah itu sendiri akan membantu dari masyarakat untuk tumbuh dan berdaya termasuk juga bagaimana mengusahakan pemberdayaan masyarakat dengan meneruskan reformasi kalurahan.”

“Kebijakan reformasi kalurahan di DIY ini menjadi satu-satunya kebijakan yang diterapkan di Indonesia dan sekarang sudah banyak pemda yang melakukan replikasi. Reformasi kalurahan ada dua hal, reformasi birokrasi dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Diberikan target kinerja kepada setiap kalurahan terkait

misalnya bagaimana mereka mengurangi kemiskinan, bagaimana mengurangi stunting, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, dan bagaimana kualitas pelayanan publik di wilayahnya.

Penting juga bagaimana menarik investasi datang ke DIY. Kita tadi juga diskusi tentang infrastruktur, tidak hanya jalan tetapi juga pelabuhan. Kemudian ketika bicara kawasan ada jalan tol, JJLS hingga Jembatan Pandansimo nantinya akan menjadi ikon. Walaupun dengan semua modalitas itu kita harus optimis, kita harus tetap waspada dan berhati-hati terutama terhadap faktor eksternal. Intinya, ke depan kita ingin memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan *settle*, bukan karena dorongan suatu proyek jangka pendek.”

Sebagai penutup, apa harapan Ibu untuk kolaborasi Kementerian Keuangan khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara lebih masif ke depan di DIY?

“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Agung Yulianta (Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY) terkait penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran APBN dan APBD. Terutama terkait tagging satuan kerja (satker) kementerian/lembaga (K/L),

program tematik dan lokasi. Harus ada sinergi antara APBN dan APBD agar semua program bisa dilaksanakan secara kolaboratif untuk efektivitas dan efisiensinya.

Kita bisa tahu, oh kalau satker K/L ini ada kegiatan ini di sini, OPD ada kegiatan apa di situ? Oh ini kok kayaknya programnya sama dengan yang punya OPD, yang OPD bisa kita revisi biar tidak duplikasi. Kalau misalnya kita bisa berkolaborasi merencanakannya bersama, saya yakin hasilnya akan jauh lebih optimal. Dengan kolaborasi ini walaupun anggaran kita dipotong, istilahnya separuh anggaran APBN digabung separuh anggaran APBD kan tetap bisa jadi satu. Kedua, terkait insentif fiskal berbasis kinerja bagi pemda, ya walaupun sudah ada seperti insentif terkait kemiskinan tetapi ada hal-hal lain yang perlu juga diberikan stimulus sebagai amunisi dan penyemangat untuk daerah. Kemudian ketiga, insentif untuk pelaku usaha supaya mereka lebih terapresiasi seperti kemudahan kredit atau akses permodalan terutama bagi pelaku usaha di DIY. Saya kira ini juga bisa membentuk iklim investasi yang lebih baik ke depannya.”





MENGENAL SISTEM NERACA NASIONAL DENGAN SEGALA MANFAATNYA

"Lahirnya Sistem Neraca Nasional bermula dari pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 yang menekankan perlunya standar statistik internasional untuk menyusun dan memperbaharui statistik yang dapat diperbandingkan guna mendukung berbagai kebutuhan kebijakan."

Bayu Sulistianoro S.S.T., M.S.E.

(Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bidang PAPK
Kanwil DJPb DIY)



Sistem Neraca Nasional merupakan standar rekomendasi internasional tentang bagaimana mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi tersebut menjelaskan neraca ekonomi makro secara komprehensif, konsisten, dan terintegrasi dalam konsep, definisi serta klasifikasi yang mengacu kepada aturan neraca yang disepakati secara internasional.



Lahirnya Sistem Neraca Nasional bermula dari pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 yang menekankan perlunya standar statistik internasional untuk menyusun dan memperbaharui statistik yang dapat diperbandingkan guna mendukung berbagai kebutuhan kebijakan. Standar Neraca Nasional pertama kali dirilis pada tahun 1953 yang kemudian mengalami pembaruan secara signifikan pada tahun 1968, 1993, dan 2008.

Sejumlah manfaat hadir dengan adanya Sistem Neraca Nasional ini. Mulai dari memonitor perilaku ekonomi, yang pertama memantau perubahan agregat (seperti Produk Domestik Bruto) yang dihubungkan dengan harga dan volume digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dan menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah. Kedua, data neraca yang menyediakan informasi terkait jenis aktivitas dan sektor ekonomi

memungkinkan untuk dilakukannya pengamatan atas perubahan *flow* ekonomi seperti produksi, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal serta ekspor dan impor baik dalam nilai atau volume.

Kedua, menganalisis ekonomi makro, di mana Sistem Neraca Nasional dapat digunakan untuk meneliti hubungan sebab-akibat dalam suatu perekonomian melalui metode ekonometrik yang menunjukkan Sistem Neraca Nasional cukup fleksibel dalam mengakomodasi persyaratan teori maupun model yang digunakan dalam penelitian. Pemerintah, korporasi publik, dan swasta memerlukan data Neraca Nasional untuk membangun model ekonometrika yang dapat dipergunakan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan.

Manfaat ketiga yaitu untuk perbandingan internasional. Data yang dihasilkan Sistem Neraca Nasional digunakan secara luas sebagai perbandingan internasional tentang volume agregat dan juga perbandingan struktur/rasio. Level agregat dari berbagai negara digunakan organisasi internasional untuk menentukan syarat pinjaman, bantuan atau dana lain pada suatu negara.

KONSEP DASAR SISTEM NERACA NASIONAL

Konsep dasar mengenai Sistem Neraca Nasional bisa kita mulai dari mengenal unit institusi dan sektor atau bisa dilihat sebagai aspek siapa (*who*). Unit insitusi merupakan unit ekonomi yang terlibat dalam berbagai transaksi serta dapat memiliki aset dan menimbulkan kewajiban atas namanya sendiri. Berdasarkan

fungsi, perilaku, dan tujuan, masing-masing unit institusi dikelompokkan menjadi sejumlah sektor, yang pertama yaitu rumah tangga (terdiri atas individu atau kelompok individu). Fungsi utama rumah tangga adalah sebagai penyedia tenaga kerja, melakukan konsumsi akhir serta sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa nonfinansial (mungkin jasa finansial). Sektor kedua yakni korporasi nonfinansial, terdiri atas unit institusi yang terlibat dalam aktivitas produksi barang dan jasa yang bersifat nonfinansial.

Sektor ketiga yaitu korporasi finansial yang terdiri atas unit institusi yang terlibat dalam aktivitas produksi jasa finansial termasuk jasa intermediasi keuangan. Keempat, pemerintahan umum yang terdiri atas unit institusi yang memenuhi tanggung jawab politik dan peran pengaturan ekonomi serta penyediaan jasa (mungkin barang) untuk konsumsi individu atau kolektif terutama yang berbasis nonpasar, serta melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan. Sektor kelima yakni lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR), terdiri atas lembaga berbadan hukum yang utamanya terlibat dalam aktivitas produksi jasa nonpasar untuk rumah tangga atau masyarakat umum, di mana sumber dana utamanya diperoleh dari sumbangan sukarela.

Konsep selanjutnya bisa dilihat melalui *transaksi dan flow lainnya (what)*. Transaksi adalah pertukaran barang, jasa, faktor produksi, aset nonproduksi dan nonfinansial, aset finansial serta kewajiban antara dua unit ekonomi yang berbeda. Adapun *flow* mengacu pada perubahan nilai ekonomi yang terjadi selama periode waktu



tertentu. Transaksi barang dan jasa menggambarkan sumber (*output*, domestik, atau impor) serta penggunaan (konsumsi antara, konsumsi akhir, pembentukan modal, atau ekspor) barang dan jasa.

Transaksi distributif terdiri atas transaksi di mana nilai tambah yang diciptakan melalui proses produksi didistribusikan untuk tenaga kerja, pemilik modal, dan pemerintah, serta transaksi yang melibatkan redistribusi pendapatan dan kekayaan (pajak penghasilan dan transfer). Sedangkan, transaksi instrumen finansial mengacu pada penambahan aset finansial atau kewajiban neto atas setiap jenis instrumen.

Entri akumulasi lain yang mencakup transaksi dan *flow* ekonomi lainnya yang sebelumnya tidak dihitung di dalam neraca. Transaksi ini merubah kuantitas atau nilai dari aset dan kewajiban. Termasuk di dalamnya adalah akuisisi dikurangi pelepasan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, *flow* ekonomi lain dari aset nonproduksi seperti penemuan atau penyusutan sumber daya bawah tanah.

Selanjutnya, kita bisa melihat aspek aset dan kewajiban (*what stocks*) sebagai faktor selanjutnya untuk melihat konsep Sistem Neraca Nasional. Aset dan kewajiban merupakan komponen balance sheet dari total ekonomi maupun sektor institusi. Perbedaannya dengan neraca *flow* ekonomi, balance sheet menggambarkan stock aset dan kewajiban yang dikuasai pada saat tertentu oleh unit atau sektor atau total ekonomi. *Stock* merupakan akumulasi dari transaksi sebelumnya dan *flow* lain serta telah dimodifikasi melalui transaksi



dan *flow* lain yang akan datang. Dengan demikian *stock* dan *flow* saling berkaitan. Cakupan aset dibatasi hanya untuk aset yang ada hak kepemilikannya. Dari hak kepemilikan ini, pemilik dapat memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara menguasai maupun menggunakan aset tersebut untuk suatu aktivitas ekonomi.

Kemudian, konsep Sistem Neraca Nasional juga bisa kita lihat melalui produk dan unit yang menghasilkan (aspek lain *who* dan *what*). Barang dan jasa merupakan hasil dari proses produksi yang diperjualbelikan dan digunakan untuk berbagai tujuan, sebagai input dalam proses produksi barang dan jasa lain, sebagai konsumsi akhir atau untuk investasi. Sistem Neraca Nasional membedakan barang dan jasa menjadi dipasarkan, dikonsumsi sendiri, serta tidak dipasarkan.

Sistem Neraca Nasional menggunakan suatu unit di mana selain melakukan aktivitas utama juga melakukan aktivitas sekunder. Unit ini disebut sebagai establishment, di mana untuk establishment dengan aktivitas utama yang sama dikelompokkan ke dalam industri sesuai dengan *International Standard Classification of All Economic Activities* (ISIC). Memperhatikan peran penting keberadaan pasar dalam ekonomi modern, Sistem Neraca Nasional membedakan antara *establishment* dalam bentuk produsen pasar, produsen yang *output*-nya dikonsumsi sendiri, dan produsen nonpasar sebagai sesuatu hal yang pokok.

Aspek terakhir untuk melihat konsep Sistem Neraca Nasional yaitu tujuan (*why*). Konsep tentang tujuan atau fungsi terkait dengan kebutuhan objektif satu jenis atau kelompok transaksi yang ditargetkan dapat memenuhinya. Pertama, transaksi dianalisis sesuai dengan sifat alamiahnya. Kemudian untuk sektor atau jenis transaksi tertentu dianalisis dari sisi

pengeluarannya dengan tujuan menjawab pertanyaan “for what purpose?”.

KONSEP DASAR SISTEM NERACA NASIONAL



Ada beberapa jenis neraca yang dikenal dalam Sistem Neraca Nasional ini. Pertama, Neraca Produksi yang dirancang untuk menunjukkan nilai tambah (*value added*) sebagai salah satu penyeimbang utama di dalam Sistem Neraca Nasional. Konsekuensinya neraca produksi tidak mencakup semua transaksi yang terkait dengan proses produksi tetapi hanya hasil produksi (*output*) serta pemakaian barang dan jasa untuk menghasilkan *output* (konsumsi antara), tidak termasuk penggunaan barang modal tetap yang akan dicatat sebagai transaksi terpisah (merupakan selisih antara penyeimbang bruto dan neto).

Kedua, Neraca Distribusi Pendapatan. Neraca ini dibagi ke dalam tiga tahap, yakni distribusi primer (menunjukkan bagaimana nilai tambah bruto didistribusi pada tenaga kerja, pemilik modal, dan pemerintah serta menunjukkan *flow* ke dan dari luar negeri), distribusi sekunder (mencakup redistribusi pendapatan melalui transfer current, selain transfer sosial dalam bentuk barang dari pemerintah dan LNPRT ke rumah tangga), dan redistribusi dalam bentuk barang (mencakup produksi nonpasar oleh pemerintah dan LNPRT atas jasa individu serta pembelian barang dan jasa oleh pemerintah dan LNPRT untuk ditransfer ke rumah tangga secara cuma-cuma atau pada harga yang tidak signifikan secara ekonomi).

Tujuan dari neraca ini adalah memberikan suatu gambaran yang lebih jelas tentang peran pemerintah sebagai penyedia

barang dan jasa ke rumah tangga sebagai individu; memberi suatu ukuran yang lebih lengkap tentang pendapatan rumah tangga; memudahkan perbandingan internasional serta perbandingan antar waktu bila ada kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi yang berubah; dan memberi gambaran lebih lengkap dari proses redistribusi antara subsektor rumah tangga atau kelompok rumah tangga.

Ketiga adalah Neraca Akumulasi, di mana kelompok pertama neraca akumulasi mencakup transaksi yang terkait dengan semua perubahan dalam aset dan kewajiban serta kekayaan netto jika tabungan dan transfer modal merupakan satu-satunya sumber perubahan dalam kekayaan netto. Neraca yang berkaitan adalah neraca modal (mencatat transaksi yang terkait dengan perolehan aset nonfinansial dan transfer modal yang terkait dengan redistribusi kekayaan) dan neraca finansial (mencatat transaksi dalam instrumen finansial untuk setiap instrumen).

Kelompok kedua neraca akumulasi mencakup perubahan dalam aset dan kewajiban serta kekayaan netto akibat faktor lain seperti penemuan atau berkurangnya sumber daya bawah tanah serta kehancuran akibat bencana alam. Neraca yang terkait adalah neraca perubahan lain

dalam volume aset (mencatat pengaruh dari kejadian istimewa yang tidak hanya menyebabkan perubahan nilai namun juga perubahan volume aset atau kewajiban) dan neraca revaluasi (mencatat perubahan seluruh nilai aset atau kewajiban akibat perubahan harga aset dan kewajiban tersebut sejak awal periode pencatatan atau saat masuk dan keluar stock atau pada akhir periode pencatatan).

AGREGAT-AGREGAT



Agregat dalam Sistem Neraca Nasional ini antara lain berupa Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh unit produsen residen ditambah sebagian (bahkan seluruh) pajak atas produk dikurangi subsidi atas produk yang tidak termasuk di dalam penilaian output (*production approach*).

Kedua, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang sama dengan Produk Domestik Bruto dikurangi pendapatan primer yang dibayar kepada unit nonresiden, kemudian

ditambah pendapatan primer yang diterima dari unit nonresiden. Dengan kata lain Pendapatan Nasional Bruto sama dengan Produk Domestik Bruto dikurangi pajak (dikurangi subsidi) atas produksi dan impor, kompensasi tenaga kerja, serta pendapatan kepemilikan yang dibayarkan ke luar negeri, ditambah pendapatan kepemilikan yang diterima dari luar negeri. Dengan mengurangi konsumsi barang modal tetap dari Pendapatan Nasional Bruto akan diperoleh Pendapatan Nasional Neto (PNN).

Ketiga, Pendapatan Nasional Bruto yang Siap Dibelanjakan yang sama dengan Pendapatan Nasional Bruto dikurangi transfer yang dibayarkan kepada nonresiden (selain pajak dikurangi subsidi atas produksi dan impor) ditambah transfer yang diterima unit residen dari luar negeri.

Pendapatan Nasional Bruto yang Siap Dibelanjakan mengukur pendapatan yang tersedia untuk konsumsi akhir dan tabungan bruto dari total ekonomi. Dengan mengurangi konsumsi barang modal tetap dari Pendapatan Nasional Bruto yang Siap Dibelanjakan diperoleh Pendapatan Nasional Neto Siap Dibelanjakan.





TANTANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2025

"Kolaborasi erat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi katalis utama mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif 2025."

Anton Hendranata

(Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
Direktur Utama BRI Research Institute)

Perekonomian global tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak mudah, bahkan mungkin lebih sulit dan kompleks dibandingkan tahun 2024. Berbagai indikator menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan politik sudah mulai terasa di pengujung tahun 2024 dan semakin menyengat pada awal tahun ini. Sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia mengalami tekanan yang signifikan pada pasar finansial dan nilai tukar mata uang. Indeks dolar AS naik signifikan ke 109,96 per 14 Januari 2024 dan memicu pelemahan mata uang dunia, termasuk rupiah. Akibatnya, harga saham pun merosot dan harga obligasi turun sehingga imbal hasil (*yield*) obligasi cenderung meningkat di pasar negara berkembang.

KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). IMF dalam laporannya pada Oktober 2024 merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 3,2% tahun 2025. Sebaliknya, OECD merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3% tahun 2025 dari prediksi sebelumnya 3,2%. Perbedaan proyeksi ini mengindikasikan ketidakpastian yang cukup tinggi. Dibandingkan 2024, kedua lembaga ini menilai perekonomian global berpeluang stagnan atau sedikit menguat. Berbeda dari IMF dan OECD, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sedikit melambat ke 3,1% pada 2025 dari perkiraan 3,2% tahun 2024. Bahkan, ada potensi penurunan lebih dalam hingga 2,7% tergantung dinamika perekonomian global.



Kami menyoroti beberapa risiko yang perlu diwaspadai tahun 2025, yaitu: (1) perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan AS sehingga dapat memberi efek domino pada perdagangan global; (2) ketidakpastian geopolitik global semakin tinggi, khususnya konflik Timur Tengah (perang Iran-Israel) yang dapat memicu instabilitas lebih luas di pasar energi dan investasi global; (3) terpilihnya kembali Trump juga bisa membawa kebijakan ekonomi yang memicu inflasi di AS dan dunia, dan (4) tekanan ekonomi dan inflasi mungkin menghambat penurunan suku bunga acuan, bahkan bisa kembali naik untuk meredam gejolak inflasi.

Seiring proyeksi melambatnya ekonomi dunia 2025, tren penurunan harga komoditas akan terus berlanjut setelah mengalami puncaknya tahun 2022. Menurut Bloomberg, indeks harga komoditas energi diperkirakan turun ke angka 94,5 pada 2025 dari 100,8 tahun 2024. Begitu pula indeks harga komoditas pertanian diperkirakan turun menjadi 108,4 dari 113,2 pada tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas global berpotensi menurunkan inflasi secara umum. IMF memperkirakan tingkat inflasi dunia sekitar 4,3% pada 2025 yang turun signifikan dari 5,8% pada tahun 2024. Kelihatannya inflasi di dunia sudah mulai terkendali.

Data per Oktober 2024 menunjukkan sekitar 58% negara di dunia berhasil menurunkan inflasinya ke bawah atau sejalan dengan target bank sentral masing-masing. Tren inflasi yang kian jinak ini memberi peluang bagi kebijakan moneter lebih longgar pada 2025. Meski banyak faktor ekonomi yang berpotensi mendukung pelonggaran kebijakan moneter global tahun 2025, kita tetap perlu waspada terhadap beberapa risiko utama yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Ketegangan geopolitik, terutama terkait perang Iran-Israel bisa memengaruhi kestabilan pasar energi. Ketidakpastian geopolitik dapat merusak rantai pasokan global dan

dapat mendorong kenaikan harga komoditas sekaligus meningkatkan inflasi.

DAMPAK KEPADA INDONESIA

Menyikapi dinamika perekonomian global saat ini, Indonesia perlu memantau kinerja ekonomi AS dan China secara lebih intensif. Hal ini didasari besarnya volume perdagangan dan investasi dengan kedua negara ini. Dari sisi perdagangan (ekspor impor), China mitra dagang terbesar Indonesia yang diikuti AS. Untuk investasi, China di urutan kedua tertinggi di bawah Singapura. Dari kontribusinya terhadap total produk domestik bruto (PDB) dunia 2023, China adalah yang terbesar yaitu 18,8%, diikuti AS 14,8%. Dengan porsi yang begitu besar dalam ekonomi global, perubahan kondisi ekonomi di AS dan China bisa berdampak signifikan pada kinerja ekonomi Indonesia.



Mari kita telaah perekonomian AS yang merupakan kiblat kebijakan moneter dan pasar finansial dunia. Ekonomi AS menunjukkan tren perlambatan hingga November 2024. Dari sisi permintaan, ekonomi AS cenderung makin tertekan. Pertumbuhan penjualan ritel dan pesanan barang tahan lama terus melambat hingga November 2024 menandakan melemahnya konsumsi. Dari sisi penawaran, produksi industri mengalami kontraksi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produksi industri yang negatif. Tingkat pemanfaatan kapasitas produksi yang turun mengindikasikan semakin lesunya aktivitas manufaktur. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur di zona kontraktif menandakan sektor manufaktur masih tertekan. Dari sisi tenaga kerja, ada kecenderungan tingkat pengangguran meningkat di atas 4% sejalan dengan naiknya *initial jobless claims* dan *continuing*

claims serta menurunnya pembukaan lapangan kerja baru.

Selanjutnya, tren menurunnya indikator-indikator ekonomi utama AS mengonfirmasi perlambatan ekonomi yang semakin tegas pada 2025. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS berpotensi melambat dari 2,8% tahun 2024 menjadi 2,2% tahun 2025. Terpilihnya Trump untuk periode kedua menambah lapisan kompleksitas bagi perekonomian AS dan dunia. Kebijakan ekonomi yang lebih protektif atau berorientasi domestik diyakini bisa berpengaruh pada perdagangan internasional, rantai pasok global, dan bisa mendorong kenaikan inflasi di AS dan dunia. Kekhawatiran naiknya kembali inflasi AS menyebabkan pergeseran arah kebijakan moneter The Fed dari optimistis menjadi cenderung pesimistis.

Penurunan suku bunga acuan AS (FFR) yang awalnya diperkirakan 1,00% tahun 2025 kini diprediksi hanya 0,50%. Pelaku pasar bahkan lebih pesimistis dengan penurunan yang lebih kecil lagi, yaitu 0,25% yang semula optimistis turun 1,25%. Di sisi lain, kami, dengan menggunakan model *machine learning* dan *deep learning* memperkirakan FFR akan turun 0,50%. Ini artinya kemungkinan FFR berada di kisaran 4,00-4,25% pada 2025 dari 4,50% tahun 2024.

Namun, jika inflasi AS kian memburuk akibat kebijakan proteksionisme Trump, ada kemungkinan penurunan FFR tak akan terjadi pada 2025, bahkan dengan kondisi yang lebih buruk ada potensi suku bunga bisa naik sebagai upaya menahan lonjakan inflasi. Perlambatan ekonomi AS tampaknya turut memengaruhi kinerja ekonomi China. Data hingga November 2024 menunjukkan sektor industri dan permintaan domestik melemah. Kondisi ini juga tecermin pada tren *leading economic indicator* China yang terus menurun. Karena itu, pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat ke 4,5% pada 2025 dari 4,8% pada 2024.

Bagaimana dengan Indonesia? Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ikut melambat tahun 2025, selaras dengan perlambatan ekonomi global, atau mampu bertahan lebih baik? Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 terlihat masih solid, terdapat tantangan cukup serius, terutama berkaitan dengan daya beli kelas menengah bawah. Berdasar indikator daya beli masyarakat yang kami buat, terlihat tekanan terhadap daya beli kelas menengah bawah sepanjang 2024 adalah (1) Indeks Kepercayaan Konsumen, (2) penjualan ritel, (3) inflasi inti, (4) pertumbuhan uang beredar riil, (5) pertumbuhan kredit konsumsi, (6) kredit bermasalah kredit konsumsi,

7) pertumbuhan penjualan mobil dan motor serta (8) pertumbuhan konsumsi barang impor.

Sebaliknya, daya beli masyarakat kelas atas masih terpantau cukup *robust* menandakan terdapat kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi. Sejak 2021-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung menurun untuk kelompok miskin, rentan miskin, dan menengah bawah. Perkembangan ini juga terlihat dari: (1) menurunnya optimisme konsumen kelas menengah bawah, sedangkan optimisme kelas atas masih tinggi; (2) peningkatan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang naik 40,3% dari 45.576 orang (Oktober 2023) ke 63.947 orang (Oktober 2024); dan (3) penurunan lowongan kerja baru di sektor-sektor berupah rendah (misal pertanian dan perdagangan). Semua ini kian mengonfirmasi kian lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

Kondisi ini tampaknya sudah disadari pemerintah. Ini tecermin dari sejumlah inisiatif program dan stimulus fiskal tahun 2025. Dari sisi fiskal, pemerintah menghadirkan berbagai program untuk mendorong permintaan domestik, terutama dalam bentuk stimulus bagi rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, dan sektor perumahan. Kabinet Merah Putih juga menetapkan tujuh quick wins program prioritas yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, lumbung pangan, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, penuntasan TBC, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan rumah sakit berkualitas. Apabila seluruh inisiatif ini berjalan efektif dan dengan dukungan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha, diproyeksikan akan menambah pertumbuhan ekonomi 0,2-0,3%.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berpotensi mencapai 5,04%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 5,02% tahun 2024. Pertumbuhan tersebut



ditopang permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Di sisi lain, inflasi nasional tahun 2025 diperkirakan naik ke 2,5-2,8% (dibandingkan 1,6% tahun 2024), masih di kisaran target 1,5-3,5% yang ditetapkan pemerintah. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan melemah dengan rata-rata Rp16.081 tahun 2025 dari Rp15.847 pada tahun 2024. Kondisi ini sejalan dengan masih kuatnya dolar AS dan terbatasnya penurunan suku bunga acuan AS.

KEBIJAKAN SISTEMIK DAN HOLISTIK

Untuk menghadapi tantangan eksternal dan memastikan perekonomian tetap tumbuh diperlukan kebijakan yang sistematis dan holistik. Oleh karena itu, sangat penting melakukan penguatan perekonomian domestik, yaitu: (1) mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli serta memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional; (2) menyederhanakan regulasi dan

meningkatkan iklim investasi domestik; (3) memperkuat stabilitas makroekonomi dengan menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah; dan (4) meningkatkan daya saing industri dengan hilirisasi industri dan mendorong inovasi di sektor manufaktur. Kolaborasi erat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi katalis utama mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif 2025.

Referensi: <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-pertumbuhan-ekonomi-2025>





PROSPEK EKONOMI INDONESIA 2025: MENCoba MENGULANG SEJARAH

“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah harus mampu menyiapkan strategi dalam mengatasi tantangan dalam negeri, infrastruktur, daya saing tenaga kerja, stabilitas politik dan hukum, menjaga daya beli masyarakat, kebijakan moneter yang tepat serta pengendalian inflasi yang efektif.”

Danis Ardiyanto, S.E., M.Ec.Dev.

(Kepala Seksi PPA IIB Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara)



Pemerintahan Prabowo Subianto menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia naik dari angka 5,3% pada awal tahun pemerintahan di 2025 menjadi 8,0% pada tahun 2029. Angka ini menunjukkan optimisme pemerintahan mewujudkan perekonomian yang tumbuh dengan cepat dalam lima tahun ke depan. Namun pertanyaan sebenarnya adalah apakah angka ini dapat dicapai mengingat perekonomian Indonesia selalu berhadapan dengan ketidakpastian global?

Menurut sejarah, ekonomi Indonesia pernah melampaui angka 8% dalam lima tahun berbeda yaitu pada 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995. Bahkan pada tahun 1968, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit sekitar 10,92% di mana pada saat itu terdapat faktor pendukung antara lain penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri, pengendalian inflasi serta keterbukaan terhadap investasi internasional.

Menilik dari strategi yang diambil pemerintah saat ini berasa *de javu* dengan strategi yang diambil pada masa-masa tersebut antara lain deregulasi perbankan, keuangan dan perizinan, kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan serta investasi asing yang berorientasi ekspor. Pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi didukung kebangkitan industri otomotif dan sektor jasa yang mirip dengan strategi hilirisasi industri yang sedang *hype* pada saat ini.

Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa perbedaan konteks yang signifikan, di mana Indonesia pernah mendapatkan keuntungan dari kondisi eksternal pada saat itu yaitu lonjakan harga minyak (*oil boom*) sebanyak dua kali antara 1974 dan 1979 yang mustahil terulang kembali serta masuknya modal besar ke sektor industri pada 1995. Namun pada masa sekarang ketidakpastian ekonomi global, kemungkinan resesi, dan faktor geopolitik dapat memengaruhi arus investasi serta perdagangan internasional

membuat kondisi menjadi tidak mudah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah juga harus mampu menyiapkan strategi dalam mengatasi tantangan dalam negeri, infrastruktur, daya saing tenaga kerja serta stabilitas politik dan hukum. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, kebijakan moneter yang tepat serta pengendalian inflasi yang efektif.

DINAMIKA AWAL TAHUN 2025

Pemerintahan Prabowo dimulai dengan dinamika internal dan eksternal yang berpotensi memengaruhi rencana pertumbuhan 8% Indonesia. Efisiensi anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas APBN bertepatan dengan kondisi inflasi yang sangat rendah. Di sisi lain, rencana kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai tarif de minimis dapat berpengaruh pada perdagangan luar negeri serta rencana pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai inisiatif strategis pemerintah menambah kompleksitas perekonomian awal tahun pemerintahan baru.

BPS merilis tingkat inflasi tahunan (yoy) pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76%. Angka ini mengindikasikan tekanan deflasi dan menjadi salah satu angka terendah dalam beberapa dekade terakhir. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tekanan

deflasi" tidak selalu berarti deflasi bulanan. Inflasi tahunan yang rendah menunjukkan kenaikan harga yang sangat lambat dan dapat menjadi indikasi melemahnya permintaan.

Secara teori ekonomi, inflasi tinggi mengindikasikan adanya kenaikan harga barang dan jasa. Sementara deflasi atau inflasi yang sangat rendah sering kali menunjukkan penurunan permintaan dan daya beli masyarakat yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kebijakan ekspansi fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah atau stimulus fiskal direkomendasikan untuk mengakselerasi permintaan. Sebaliknya, kebijakan kontraksi fiskal seperti pemotongan anggaran dapat memperburuk tekanan deflasi dengan mengurangi perputaran uang di ekonomi.

PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2025

Menilik angka pertumbuhan Indonesia selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia tumbuh rata-rata 4,2% per tahun. Namun, jika dampak pandemi COVID-19 diabaikan maka angka tersebut akan meningkat menjadi 4,9% setiap tahunnya. Pencapaian ini masih kalah dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertumbuhannya mencapai hampir 6% akibat kenaikan harga komoditas.



Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan 2025 pada angka 4,7%-5,5% yang akan didorong faktor konsumsi domestik dan ekspor dengan tetap mewaspadai konsumsi rumah tangga yang lebih lemah dan ekspor yang dipengaruhi perlambatan permintaan global serta potensi tarif de minimis Amerika Serikat yang berlaku pada 2025 dapat mengganggu perdagangan global.

Kebijakan tarif de minimis dari Amerika Serikat membebaskan bea masuk untuk barang kiriman di bawah nilai US\$800 dimanfaatkan oleh *e-commerce* untuk mengimpor barang murah dari China dan negara lain termasuk Indonesia. Trump berencana untuk mengakhiri kebijakan ini untuk melindungi industri domestik AS dan menekan impor barang murah. Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar kedua Indonesia setelah Cina dengan nilai ekspor nonmigas sekitar US\$25 miliar. Jika tarif *de minimis* ini dihapus akan berdampak pada biaya landed cost dan akan mengurangi daya saing dengan produk domestik AS yang lebih murah yang pada akhirnya menekan ekspor barang produksi usaha kecil menengah Indonesia ke AS berupa tekstil dan kerajinan.

Andaikan kebijakan ini direspon dengan menaikkan tarif impor barang Amerika Serikat seperti elektronik dan mesin, hal ini akan memengaruhi konsumen domestik kelas menengah ke atas yang pada akhirnya dapat mendorong substitusi impor dengan penggunaan produk domestik serta mendukung industri dalam negeri. Selain itu kebijakan "balasan" tarif impor barang AS dapat memicu inflasi barang tertentu. Namun menilai inflasi Indonesia pada Januari 2025 yang rendah akan memberikan kesempatan perekonomian untuk menyerap kenaikan biaya tanpa inflasi yang signifikan sesuai dengan proyeksi inflasi 2025 dari Bank Indonesia pada angka 1,5%-3,5% dengan

asumsi konsumsi domestik yang stabil dan pasokan pangan yang terjaga.

Jika Indonesia berhasil memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan produksi domestik dan diversifikasi pasar ekspornya, dampak negatif dari tarif *de minimis* bisa dikurangi. Namun, jika tidak, ini bisa menjadi hambatan pertumbuhan, terutama untuk sektor yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

PEMBENTUKAN DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA)



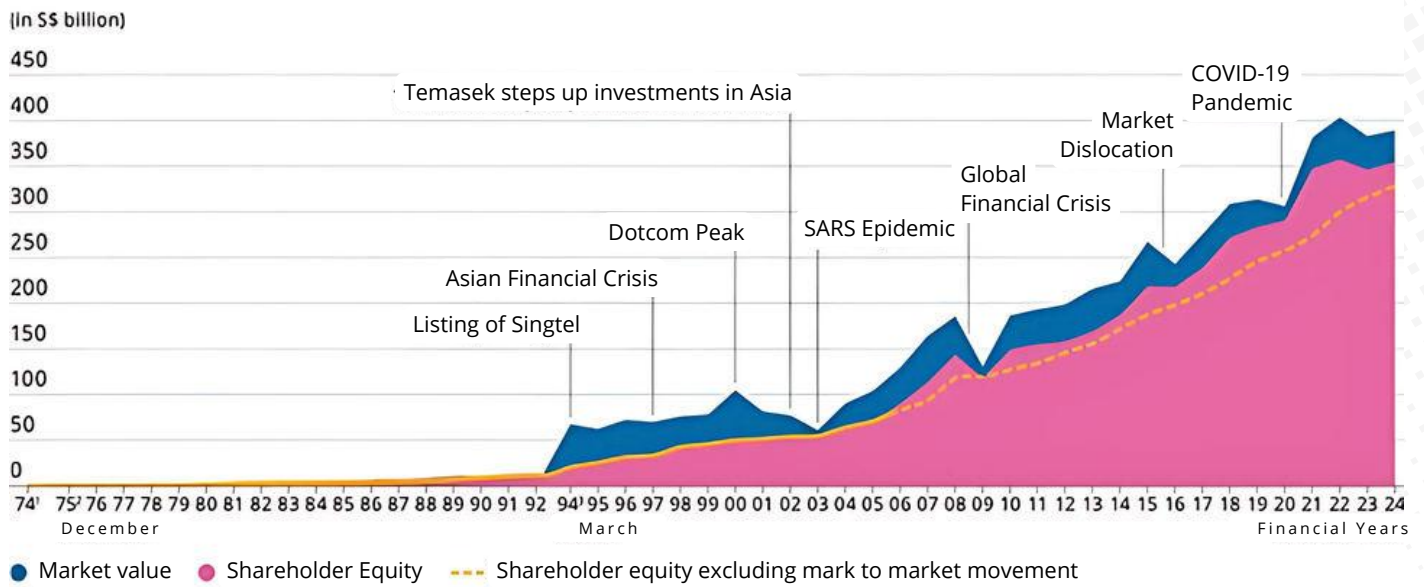
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara secara lebih efisien dan produktif. Danantara diposisikan sebagai "kendaraan finansial" untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 dengan mengelola aset negara yang tersebar di BUMN secara optimal dan menginvestasikan ke sektor strategis sehingga hasil dari pengembalian investasi lebih tinggi dibandingkan jika hanya mengandalkan APBN saja.

Peran dari Danantara ini serupa dengan peran yang dimainkan oleh Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Temasek Holdings didirikan tahun 1974 di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad pada 1993 di Malaysia adalah Sovereign Wealth Funds (SWF) untuk mengelola aset negara untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang dan mendukung

pembangunan nasional. Temasek mengelola aset senilai SGD389 miliar (sekitar US\$290 miliar) per 2024, sementara Khazanah mengelola RM150 miliar (sekitar US\$34 miliar). Kedua lembaga ini beroperasi sebagai entitas profesional yang relatif independen dari intervensi politik langsung, fokus pada investasi komersial dan diversifikasi portofolio. Danantara memiliki visi serupa menjadi "superholding" BUMN yang mengelola aset negara secara terintegrasi, namun mekanisme operasional Danantara masih bergantung pada Revisi UU BUMN.

Temasek memainkan peran kunci dalam transformasi Singapura dari ekonomi berkembang menjadi pusat finansial global. Dua dekade pertamanya, Temasek mendukung industrialisasi dan ekspansi perusahaan seperti Keppel Corporation dan Sembcorp yang meningkatkan PDB Singapura dari US\$5,1 miliar (1974) menjadi US\$73,7 miliar (1994) dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 7-8%. Singapura bersabar selama dalam waktu yang cukup lama karena visi jangka panjang Lee Kuan Yew dan stabilitas politiknya memungkinkan eksperimen ekonomi tanpa tekanan elektoral. Temasek tidak langsung memberikan dampak besar pada 10 tahun awal pertamanya dikarenakan fokusnya adalah konsolidasi aset, bukan ekspansi agresif.

Pada akhirnya, keberhasilan Danantara dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% bergantung pada kemampuannya meniru tata kelola Temasek yang terbukti menghasilkan pengembalian 16% secara tahunan dalam jangka panjang. Namun, kesabaran Singapura yang membiarkan Temasek matang selama puluhan tahun dari konsolidasi aset pada 1974 hingga ekspansi global setelah 2004, nampaknya akan sulit direplikasi di Indonesia.



Sumber : www.temasek.com.sg





#KABURAJADULU: LARI DARI KENYATAAN ATAU STRATEGI FINANSIAL CERDAS?

"Dengan membawa pengalaman internasional, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Tanah Air. Pada akhirnya, #KaburAjaDulu bukan berarti pergi tanpa arah, namun sebuah upaya untuk memperpanjang langkah."

Mutia Rizki, S.S.

(Pelaksana pada Subbagian TURT Bagian Umum Kanwil DJPb DIY)



Bicara tentang tren #KaburAjaDulu, yang tebersit di pikiran mungkin kata 'kabur' dianggap menjadi coping mechanism seseorang untuk sejenak lari dari masalah atau suatu tempat. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata 'kabur' dimaknai sebagai 'meninggalkan tugas (pekerjaan, keluarga, dan sebagainya) tanpa pamit; menghilang'. Maka, tidak salah juga jika memaknai #KaburAjaDulu sebagai salah satu bentuk ekspresi dalam menghadapi kondisi yang tidak nyaman terkait ekonomi saat ini. Dari sini lah muncul pertanyaan-pertanyaan yang memantik diskursus, apakah mental kita sudah siap untuk bertahan hidup di luar negeri? Apakah sebagai WNI, kita siap menghadapi suhu dingin di negara 4 musim? Yang juga tak kalah penting, siap kah kita untuk tidak lagi makan nasi padang dan mi ayam Wonogiri?

#KABURAJADULU DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI NASIONAL



Tren ini mulai ramai diperbincangkan sejak munculnya akun media sosial tenaga kerja migran membagikan lowongan pekerjaan di luar negeri dengan mencantumkan tagar #KaburAjaDulu. Seiring tenaga kerja migran lain hingga beberapa diaspora turut memberikan insight dan tips untuk bekerja di luar negeri hingga proses pindah kewarganegaraan, perspektif tren ini pun semakin beragam. Yang awalnya sekadar memberikan motivasi kepada *job seeker* untuk tidak takut bermimpi dan lebih gigih mencari informasi, lambat laun bertambah perspektif lain yang dikaitkan dengan iklim politik dan ekonomi di Indonesia.

ini pun semakin beragam. Yang awalnya sekadar memberikan motivasi kepada *job seeker* untuk tidak takut bermimpi dan lebih gigih mencari informasi, lambat laun bertambah perspektif lain yang dikaitkan dengan iklim politik dan ekonomi di Indonesia.

Padahal secara umum, maksud awal dari tren ini merupakan sebuah dorongan untuk bekerja atau mencari peluang di luar negeri, yang dalam jangka panjang dapat memberi dampak ekonomi yang luas, baik bagi individu maupun perekonomian nasional. Di baliknya, ada realitas ekonomi yang kuat yaitu bekerja di luar negeri bukan hanya tentang meraih mimpi pribadi, tetapi juga membuka peluang bagi ekonomi keluarga dan bahkan perekonomian nasional.

Bagi individu, keputusan untuk bekerja di luar negeri sering kali didorong oleh harapan akan penghasilan yang lebih tinggi. Tidak bisa dimungkiri, gaji dalam mata uang asing sering kali jauh lebih besar dibandingkan upah di dalam negeri walaupun biaya hidup di luar negeri lebih tinggi. Dengan penghasilan yang lebih tinggi itu, banyak tenaga kerja migran yang mampu meningkatkan taraf hidup keluarga. Biaya pendidikan anak, perawatan orang tua, renovasi rumah hingga investasi dalam bisnis kecil pun menjadi lebih terjangkau.

Tak hanya bagi keluarga tenaga kerja migran, dampak ekonomi dari tren ini juga terasa di skala yang lebih luas. Remitansi yang dikirimkan oleh para tenaga kerja migran ke Indonesia pun mengalami peningkatan pesat. Tercatat pada tahun 2023, angka remitansi mencapai Rp159,6 triliun,

dan diproyeksikan naik menjadi Rp251,1 triliun pada tahun 2024 (data dari Bank Indonesia). Aliran dana ini menjadi salah satu sumber devisa utama bagi negara, membantu memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Proyeksi kenaikan remitansi ini salah satunya merupakan efek dari peningkatan literasi keuangan para tenaga kerja migran. Kesadaran untuk menabung dan mengirimkan sebagian penghasilan untuk keluarga di Indonesia yang memang membutuhkan pun meningkat. Secara tidak langsung hal tersebut membuat perputaran ekonomi di Indonesia, terutama di kampung halaman masing-masing menjadi lebih bergerak.

DUKUNGAN PEMERINTAH, MEMBUKA JALAN MENUJU KESEMPATAN GLOBAL

Peluang karier yang dibagikan melalui tagar ini cukup beragam, mulai dari *white collar worker* hingga *blue collar worker* sehingga membuat masyarakat dari berbagai kalangan semakin tertarik untuk menjadi tenaga kerja migran. Mulai dari bidang kesehatan seperti perawat dan *caregiver*, bidang hospitality seperti staf hotel & kru *cruise ship* hingga tenaga kerja manufaktur dan konstruksi. Dengan beragamnya peluang bagi WNI, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Berbagai pelatihan dan beasiswa bagi yang ingin berkarier di luar negeri juga disediakan oleh pemerintah, salah satunya melalui Indonesian Diaspora Network dan program magang internasional. Hal ini menjadi penting mengingat ketatnya persaingan di kancah global sehingga WNI perlu semakin menguatkan kemampuan



berbahasa atau kemampuan lain yang diperlukan.

Selain itu, berbagai program juga difasilitasi oleh pemerintah bagi WNI yang hendak bekerja ke luar negeri agar tetap terjamin keamanannya dengan pengawasan dan ketentuan yang ketat. Salah satunya melalui fasilitasi visa dan kerja sama bilateral dengan negara tujuan. Program ini mencakup penyederhanaan proses visa, pembuatan jalur khusus bagi tenaga kerja terampil hingga peningkatan perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah telah menjalin kerja sama khusus dengan Indonesia untuk menerima tenaga kerja di sektor-sektor strategis.

Pemerintah juga menyediakan WHV (*Working Holiday Visa*), yaitu jenis visa yang memungkinkan seseorang untuk bekerja dan berlibur di negara tujuan dalam jangka waktu tertentu. Program ini biasanya diperuntukkan bagi anak muda (usia 18-30 atau 35 tahun tergantung negara) yang ingin merasakan pengalaman tinggal di luar negeri sambil bekerja untuk membiayai perjalanan mereka. Beberapa negara yang telah bekerja sama dengan Indonesia yaitu Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Program WHV menjadi salah satu program yang memiliki animo tinggi di masyarakat, ditambah dengan adanya cerita-cerita menarik yang dibagikan oleh WNI pemegang WHV melalui media sosial.

Tak hanya bagi tenaga kerja, #KaburAjaDulu juga menjadi pemicu bagi pelajar dan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Salah satu peluang terbesar adalah melalui program beasiswa, seperti LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dari Kementerian Keuangan yang mendukung mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di berbagai universitas terbaik di dunia. LPDP dapat menjadi pembuka jalan meraih ilmu, pengalaman, dan koneksi global yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Tanpa mengesampingkan tantangan yang ada seperti perbedaan budaya hingga manajemen keuangan yang lebih kompleks, peluang untuk belajar di luar negeri semakin terbuka lebar sehingga membawa dampak positif bagi Indonesia di masa depan. Pergi dulu, belajar dan berkembang, lalu kembali untuk membangun negeri sebuah wujud nyata dari *"think global, act local"*.

Bagi yang memilih jalur ini, peluang terbuka luas dengan bermacam peran, baik sebagai mahasiswa, profesional maupun sebagai agen perubahan yang suatu hari nanti kembali untuk membangun negeri, memperbaiki finansial, dan menggapai mimpi yang lebih tinggi. Pergi untuk belajar dan bekerja bukan berarti melupakan Indonesia. Justru, dengan membawa pengalaman internasional, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Tanah Air. Pada akhirnya, #KaburAjaDulu bukan berarti pergi tanpa arah, namun sebuah upaya untuk memperpanjang langkah.





INDONESIAN TREASURY

PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA



MELIHAT LEBIH DEKAT PERAN KPPN YOGYAKARTA SEBAGAI FINANCIAL ADVISOR

"Kehadiran KPPN Yogyakarta sebagai Financial Advisor menunjukkan pentingnya transformasi fungsi KPPN dalam mendukung tata kelola keuangan negara."

David Surya Pratama

(Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPPN berfungsi tidak hanya sebagai pengelola anggaran, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam pencapaian tujuan keuangan pemerintah. Dalam konteks ini, peran KPPN Yogyakarta sebagai *Financial Advisor* menjadi signifikan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.



Sebagai *Financial Advisor*, KPPN Yogyakarta tidak hanya berfokus pada tugas administratif, tetapi juga memberikan pendampingan, solusi, dan rekomendasi strategis kepada satuan kerja maupun pemerintah daerah. Dengan peran ini, KPPN Yogyakarta bertujuan memperkuat tata kelola keuangan agar mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Peran ini mencerminkan transformasi fungsi KPPN dari sekadar pelaksana teknis menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kebijakan keuangan yang berkualitas tinggi.

LATAR BELAKANG PERAN KPPN YOGYAKARTA



Sebagai salah satu bagian penting dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Yogyakarta memiliki peran yang terus berkembang, termasuk dalam kapasitasnya sebagai *Financial Advisor*. Latar belakang peran ini berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah, seiring dengan tuntutan reformasi dan digitalisasi di sektor keuangan publik.

Pentingnya peran ini juga didorong oleh kompleksitas pengelolaan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah yang memerlukan pendampingan teknis dan strategis. KPPN Yogyakarta diharapkan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan mampu memberikan rekomendasi serta solusi berdasarkan analisis mendalam untuk memastikan optimalisasi sumber daya keuangan. Hal ini menjadi dasar transformasi signifikan dalam fungsi KPPN.

Selain itu, latar belakang peran *Financial Advisor* di KPPN Yogyakarta juga berkaitan dengan upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menjadi mitra strategis bagi instansi pemerintah, KPPN Yogyakarta memainkan peran penting dalam menjembatani kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan spesifik daerah. Peran ini diharapkan menciptakan sinergi yang lebih baik demi tercapainya pembangunan nasional secara merata.

DEFINISI *FINANCIAL ADVISOR* DALAM KONTEKS KPPN

Dalam konteks KPPN, istilah *Financial Advisor* merujuk pada peran strategis dalam memberikan saran, pendampingan, dan rekomendasi teknis terkait pengelolaan keuangan negara. KPPN Yogyakarta tidak hanya bertindak sebagai pengelola keuangan secara operasional, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi satuan kerja dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan

pengelolaan anggaran.

Sebagai *Financial Advisor*, KPPN Yogyakarta mengambil tanggung jawab untuk menyelenggarakan analisis, evaluasi serta solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan. Peran ini melibatkan pemberian rekomendasi berdasarkan data dan informasi keuangan yang valid sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini menjadi bagian dari reformasi keuangan negara yang memprioritaskan efisiensi dan tata kelola yang baik.

Dalam pelaksanaannya, KPPN Yogyakarta sebagai *Financial Advisor* berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan fiskal nasional dengan implementasi di tingkat daerah. Dengan demikian, peran *Financial Advisor* yang diemban oleh KPPN tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi strategis yang bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

TUGAS DAN FUNGSI KPPN YOGYAKARTA SEBAGAI *FINANCIAL ADVISOR*



Sebagai *Financial Advisor*, KPPN Yogyakarta memikul tugas dan fungsi penting dalam mendukung pengelolaan keuangan satuan kerja pemerintah pusat maupun daerah. Fungsi utamanya meliputi pemberian rekomendasi strategis terkait penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi keuangan. KPPN bertindak sebagai konsultan yang membantu satuan kerja melakukan penyelarasan antara kebijakan nasional dan realisasi keuangan di tingkat operasional.

Selain itu, KPPN Yogyakarta melaksanakan analisis keuangan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan peluang dalam pengelolaan anggaran. Dengan kemampuan ini, KPPN memberikan solusi berbasis data untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan dana publik. Mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sehingga transparansi dapat terjamin dan potensi penyimpangan bisa diminimalkan.

Sebagai pelengkap, KPPN Yogyakarta juga berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan teknis bagi satuan kerja terkait pengelolaan keuangan. Dengan pendekatan ini, KPPN memastikan bahwa *stakeholder* memiliki kapasitas yang cukup dalam melaksanakan kewajibannya sesuai regulasi. Hal tersebut menggambarkan pentingnya fungsi KPPN dalam memperkuat tata kelola keuangan pemerintah secara menyeluruh.

STRATEGI IMPLEMENTASI PERAN *FINANCIAL ADVISOR*

Untuk melaksanakan peran selaku *Financial Advisor* secara optimal, KPPN Yogyakarta mengembangkan strategi implementasi yang terarah dan komprehensif. Strategi ini melibatkan peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan dan penguatan kompetensi para petugas sehingga mereka mampu memberikan saran dan rekomendasi berbasis data yang akurat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi memiliki nilai strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Selain itu, KPPN Yogyakarta juga mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan satuan kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui dialog intensif dan konsultasi rutin, KPPN dapat memahami kebutuhan unik setiap satuan kerja sehingga solusi yang ditawarkan lebih relevan dan dapat diterapkan secara efektif. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan di wilayah Yogyakarta.

Strategi lain yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses pengelolaan keuangan. Dengan mengintegrasikan sistem keuangan berbasis digital, KPPN Yogyakarta mampu melakukan monitoring dan analisis keuangan secara *real-time*. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi.

MANFAAT PERAN *FINANCIAL ADVISOR* BAGI *STAKEHOLDER*

Peran KPPN Yogyakarta sebagai *Financial Advisor* menghadirkan berbagai manfaat signifikan bagi para *stakeholders*, baik satuan kerja pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan melalui pendampingan teknis yang tepat. Dengan bimbingan KPPN, para *stakeholder* dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, akuntabel, dan sesuai peraturan sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Manfaat lainnya adalah pelaksanaan anggaran yang lebih optimal berkat rekomendasi dan analisis berbasis data yang disediakan KPPN. Pendekatan berbasis data ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, tetapi juga meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan demikian, *stakeholder* dapat memanfaatkan alokasi anggaran secara transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung berbagai program strategis.

Selain itu, KPPN Yogyakarta juga berperan dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui fungsinya sebagai *Financial Advisor*, KPPN memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara kedua tingkat pemerintahan. Hal ini tidak hanya menciptakan kebijakan fiskal yang inklusif dan adaptif, tetapi juga

memperkuat perilaku tata kelola keuangan yang mendukung pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PERAN *FINANCIAL ADVISOR*



Dalam menjalankan perannya sebagai *Financial Advisor*, KPPN Yogyakarta dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan adaptasi terhadap regulasi yang terus berkembang, termasuk kebijakan fiskal baru seperti digitalisasi pengelolaan keuangan. Hal ini memerlukan penyesuaian internal yang cepat agar peran KPPN tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan para *stakeholder*.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang *Financial Advisory* juga menjadi kendala. Sebagai lembaga pemerintah, KPPN perlu memastikan bahwa seluruh pejabat dan staf memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan rekomendasi analitis yang bermanfaat bagi satuan kerja. Tanpa penguatan kompetensi ini, efektivitas peran sebagai *Financial Advisor* menjadi kurang maksimal.

Tantangan lainnya adalah menciptakan sinergi yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kebutuhan dan prioritas antarwilayah sering kali menghambat implementasi kebijakan keuangan yang seragam. KPPN Yogyakarta harus mampu menjembatani perbedaan ini melalui komunikasi intensif dan pendekatan yang fleksibel agar peran *advisory* dapat diterima dan memberikan

dampak nyata pada pengelolaan keuangan daerah.

STUDI KASUS: IMPLEMENTASI DI KPPN YOGYAKARTA

Sebagai contoh nyata implementasi peran *Financial Advisor*, KPPN Yogyakarta menjalankan serangkaian program penguatan fungsi melalui pembentukan Tim Kerja Implementasi *Financial Advisor*. Tim ini bertugas memberikan pendampingan teknis kepada satuan kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi tata kelola keuangan yang sesuai dengan regulasi.

Dalam praktiknya, KPPN Yogyakarta mengaplikasikan strategi berbasis data dengan menyusun kertas kerja mandatory dan *complementary pra-monitoring*. Proses ini dilakukan untuk memahami karakteristik dan permasalahan spesifik setiap satuan kerja sehingga solusi yang diberikan lebih akurat. Tim juga memberikan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring kepada Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Hasil implementasi menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari segi akuntabilitas dan efisiensi keuangan satuan kerja yang didampingi. Selain itu, kolaborasi yang erat antara KPPN Yogyakarta dan instansi pemerintah lainnya berhasil menciptakan sinergi yang mendukung kebijakan fiskal nasional. Studi kasus ini menjadi bukti pentingnya transformasi KPPN menjadi mitra strategis dalam mengelola keuangan negara.

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PERAN *FINANCIAL ADVISOR*

Evaluasi dan pengembangan peran KPPN Yogyakarta sebagai *Financial Advisor* menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara. Evaluasi tersebut dilakukan melalui monitoring rutin terhadap kinerja tim kerja serta analisis capaian dari

rekomendasi yang diberikan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memahami hambatan serta peluang penguatan peran di masa mendatang.

Dalam proses pengembangan, KPPN Yogyakarta fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan sertifikasi keuangan. Pemanfaatan teknologi terkini seperti sistem informasi terintegrasi juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan *Financial Advisory*. Pengembangan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.

Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, satuan kerja, dan instansi terkait juga menjadi bagian dari strategi pengembangan. Dengan membangun komunikasi yang efektif, KPPN Yogyakarta mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik para pemangku kepentingan. Hal ini memastikan bahwa peran *Financial Advisor* tidak hanya relevan tetapi juga menjadi solusi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat ditarik dari peran KPPN

dapat ditarik dari peran KPPN. Yogyakarta sebagai *Financial Advisor* menunjukkan pentingnya transformasi fungsi KPPN dalam mendukung tata kelola keuangan negara. KPPN Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai pengelola teknis keuangan, tetapi juga mitra strategis yang memberikan solusi dan rekomendasi berbasis data bagi satuan kerja serta pemerintah daerah guna menjaga efisiensi dan akuntabilitas keuangan.

Untuk memperkuat peran ini, keberlanjutan upaya seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi terintegrasi, dan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi keharusan. Dengan pendekatan semacam ini, KPPN Yogyakarta dapat terus

Rekomendasi selanjutnya adalah menjaga konsistensi evaluasi terhadap pelaksanaan peran *Financial Advisor*. Hal ini memungkinkan pemahaman atas kendala yang muncul, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan pengembangan ke depan. Langkah ini memastikan KPPN Yogyakarta dapat tetap relevan dan adaptif sebagai mitra strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan pemerintah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.





TREASURY LEARNING CENTER, WAHANA EDUKASI DAN RISET TENTANG APBN DI JANTUNG DIY

"Dengan letaknya yang strategis di jantung Provinsi DIY, gedung berstatus cagar budaya ini dimanfaatkan oleh berbagai Unit Eselon I Kementerian Keuangan untuk menentukan arah kebijakan agar APBN bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Pemanfaatan ini menunjukkan Gedung TLC menjadi saksi solidnya sinergi dan kolaborasi Kemenkeu Satu."

Rizal Bomantama, S.I.P.
(Pranata Hubungan Masyarakat Kanwil DJPb DIY)



Yogyakarta – Bicara tentang Jalan Malioboro, masyarakat mungkin hanya tebersit soal toko-toko yang berjajar di sepanjang jalan legendaris tersebut, Pasar Beringharjo, Benteng Vredeburg, Titik 0 Km hingga Gedung Agung. Di balik keriuhan kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata di Yogyakarta itu, terdapat satu bangunan yang menjadi wahana edukasi dan riset tentang APBN, perekonomian hingga perbendaharaan negara.

Bangunan tersebut dikenal dengan nama Treasury Learning Center (TLC) yang berada di Jalan Reksobayan dan bersanding langsung dengan Gedung Agung Yogyakarta. Memiliki luas kurang lebih 1.217 meter persegi, Gedung TLC yang berada di bawah pengelolaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) itu memiliki banyak fungsi untuk mendukung pembelajaran dan riset di bidang perbendaharaan, fiskal hingga perekonomian.

Dengan letaknya yang strategis di jantung Provinsi DIY, gedung berstatus cagar budaya ini dimanfaatkan oleh berbagai Unit Eselon I Kementerian Keuangan agar APBN bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Termasuk dimanfaatkan oleh BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu. Atas pemanfaatan ini, Gedung TLC menjadi saksi solidnya sinergi dan kolaborasi Kemenkeu Satu.

Sebelum diresmikan dengan nama Treasury Learning Center, gedung ini sudah lama dimanfaatkan sebagai tempat untuk pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan catatan sejarah, gedung ini pernah

menyandang nama Kantor Bendahara Negara (KBN) Yogyakarta). Kemudian pada tahun 1982, gedung ini berubah nama menjadi Kantor Penerimaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN). KPN dan KKN ini dahulu dikenal dengan fungsi pembayaran gaji pegawai dan pensiunan yang masih dibayar secara tunai. Gedung ini menyimpan brankas berisi uang yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai dan pensiunan.



Gedung ini memasuki fase sejarah selanjutnya di tahun 1990 ketika KPN dan KKN bergabung menjadi Kantor Penerimaan Kas Negara (KPKN). Satuan kerja verifikasi pun berubah nama menjadi Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) dan kemudian berubah lagi menjadi Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran (Kasipa). Fase selanjutnya bagi gedung ini hadir ketika Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara resmi diteken sejalan dengan reorganisasi Departemen Keuangan. Sejak saat itu, KPKN berubah menjadi KPPN yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Perubahan itu berdampak kepada Gedung TLC yang sejak 26 Juli 2007 hingga tahun 2010 digunakan sebagai Kantor Perbendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Percontohan Yogyakarta. Hingga akhirnya KPPN Yogyakarta berpindah tempat ke Gedung Keuangan Negara Yogyakarta yang berada di Jalan Kusumanegara, Umbulharjo. Gedung TLC ini pun dialihfungsikan sebagai Gedung Arsip Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2022.

Dan setelah melalui tahap renovasi, gedung ini diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Astera Primanto Bhakti dengan nama Treasury Learning Center (TLC) pada tanggal 12 November 2022 yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Dalam arahnya saat itu, Dirjen Perbendaharaan berharap gedung ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung UMKM dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah selain menjadi wahana pembelajaran dan riset di bidang perbendaharaan.

Tak hanya itu, TLC juga diharapkan menjadi museum budaya Kementerian Keuangan di bawah pengelolaan Kanwil DJPb Provinsi DIY. Konsep pengembangan TLC menjadi museum yang dikolaborasikan dengan pembelajaran mengenai APBN, keuangan negara, dan perbendaharaan masih terus dikelola oleh Kanwil DJPB Provinsi DIY.

FASILITAS MUMPUNI

Sebagai gedung yang menjadi wahana pembelajaran, riset hingga pertemuan yang membahas kebijakan publik, TLC memiliki fasilitas pendukung yang mumpuni. Perlu diketahui, gedung ini mampu menampung kurang lebih 80 orang dalam satu ruangan utamanya. Ruangan tersebut pun bersifat fleksibel, bisa dibagi menjadi 2 ruangan yaitu ruang kelas yang mampu menampung 60 orang dan ruang rapat yang bisa digunakan kurang lebih oleh 15 orang. Sarana pendukung lainnya yaitu ruang tamu, ruang makan, sejumlah kamar mandi di setiap sudutnya, ruang multimedia, musola hingga kamar tidur pengajar.

Sepanjang tahun 2024, setidaknya ada 14 pertemuan penting mengenai keuangan negara yang dibahas di gedung ini. Mulai dari Koordinasi Penyusunan Laporan



Keuangan antara Kanwil DJPb Provinsi DIY dengan KPPN lingkup DIY, *One on One Meeting* Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2024 bersama 10 satuan kerja kementerian/lembaga di DIY, Forum Diskusi Kamis Pon: *Refreshment* (Monitoring Evaluasi) PNBP, Monitoring Evaluasi Penggunaan RPATA, Kunjungan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Forum Diskusi Kamis Pon dengan tema *Executive Dialogue: Spending Better* untuk Mewujudkan Layanan Publik Berkualitas pada periode Januari-Maret 2024.

Selanjutnya ada Sosialisasi Revisi PP Direktorat Jenderal Anggaran, *One on One Meeting* Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2024, Edukasi dan Sosialisasi Pembiayaan APBN dan SBN Ritel, dan Forum Diskusi Kamis Pon dengan tema Diseminasi Reviu Efisiensi Belanja dan Sosialisasi Reformulasi IKPA Tahun Anggaran 2024 pada periode April-Juni 2024. Lalu pada periode Juli-Desember 2024 TLC berkesempatan menjadi tempat penyelenggaraan *Executive Meeting* Penguatan Integritas 2024 yang dihadiri langsung Inspektorat Jenderal Kemenkeu, *Sharing Session* Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Anggaran, dan FGD Pengelolaan SDM pada Manajemen Eksekutif KNEKS serta BMT Summit 2024: Outlook Institusi Keuangan Mikro Syariah 2025.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan betapa strategisnya peran Gedung TLC dalam pembelajaran, riset hingga pembahasan tentang kebijakan keuangan negara. TLC pun menjadi simbol perekat sinergi dan kolaborasi dalam wadah Kemenke Satu.

LOKASI YANG STRATEGIS

Salah satu keunggulan utama TLC yang selalu dirasakan dan disampaikan oleh para penggunanya yaitu lokasinya yang sangat strategis. Berada di ruas jalan tersibuk di DIY, akses transportasi umum ke TLC jelas sangat mudah dicapai dan lokasinya gampang ditemukan.

Selain itu, penyelenggaraan acara di TLC bisa dikolaborasikan dengan kegiatan wisata di Malioboro, Pasar Beringharjo, Benteng Vredenburg, Titik 0 Km hingga Gedung Agung yang lokasinya sangat dekat.

Salah satunya diungkapkan oleh Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Januarti Tiurmaida yang mengapresiasi penyelenggaraan acara antara pihaknya, Kanwil DJPb DIY, dan KPPN lingkup DIY di Gedung TLC yang bertajuk “Executive Meeting Penguatan Integritas 2024. Ia menyebut lokasi TLC yang sangat strategis memudahkan penyelenggara untuk mengundang banyak pihak dalam rangka menyukseskan program-program Kemenkeu terkait pengelolaan APBN dan keuangan negara.

Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tercatat sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan di TLC. Sekali lagi, lokasi TLC yang sangat strategis membantu dan mendukung kesuksesan terselenggaranya acara.

“Rapat Kerja ini tentunya juga menjadi salah satu bentuk sinergi Kemenkeu Satu antara Sekretariat KNEKS dengan Ditjen Perbendaharaan, yang merupakan bagian dari Kemenkeu Satu, yang selalu diingatkan oleh pimpinan untuk menjalankan, dan mudah-mudahan bisa menguatkan sinergi antar unit Eselon I Kemenkeu sesuai arahan dari pimpinan” kata Gandy Setiawan selaku Direktur Peman-tauan Program dan Kinerja Sekretariat KNEKS.

Hal senada juga disampaikan Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS, Dwi Irianti Hadiningdyah yang hadir langsung di TLC saat penyelenggaraan acara “BMT Summit dan FGD *Outlook* IKMS 2025” pada 12 Desember 2024



yang dihadiri 100 perwakilan Baitul Maal wat-Tamwiil (BMT). Setelah TLC mengalami proses renovasi pada pertengahan hingga menjelang akhir 2024, KNEKS berkesempatan menjadi yang pertama untuk memanfaatkan gedung ini kembali.

“Menurut informasi yang kami terima, renovasi pada tahun 2024 merupakan renovasi kedua. Renovasi pertama selesai di bulan November 2022 dan telah diresmikan oleh Dirjen Perbendaharaan Bapak Astera Primanto Bhakti. Dan ternyata di sebelah kanannya ada prasasti bertuliskan pernah diresmikan oleh Bapak Radius Prawiro tahun 1986. Pemanfaatannya sampai sekarang luar biasa, lokasinya berada di tengah kota dan sangat strategis,” ucap Dwi.

Dwi Irianti berharap Gedung TLC Yogyakarta bisa terus bermanfaat dan menjadi simbol sinergi serta kolaborasi Kemenkeu Satu dalam mengoptimalkan keuangan negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Terus maju dan pertahankan semangat Kemenkeu Satu,” tuturnya.

Untuk menggunakan Gedung Treasury Learning Center ini, kita bisa menghubungi Kanwil DJPb DIY selaku pengelola melalui berbagai saluran yang dimiliki. Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya! Ayo Makaryo!



MENGENAL ECOPRINT, KARYA SENI BARU DARI ALAM

"Ecoprint merupakan teknik pencetakan yang menggunakan daun, bunga maupun bagian tanaman lainnya sebagai sumber corak dan warna alami. Pemilihan daun atau bunga tertentu bertujuan untuk mengeluarkan guratan dan corak khas di kain."

Alphiani Nugrahaningsih Purbasari, S.H.
(Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPb DIY)

Yogyakarta, kota seni budaya yang banyak melahirkan seniman dengan berbagai macam kreativitasnya yang terus berkembang. Kini, muncul satu karya seni yang digandrungi di Yogyakarta bernama *Ecoprint*. Mari mengenal lebih jauh jenis kesenian ini dari Mbak Naning selaku pemilik Suryaning Batik.

Mbak Naning menjelaskan *Ecoprint* merupakan teknik pencetakan yang menggunakan daun, bunga maupun bagian tanaman lainnya sebagai sumber corak dan warna alami. Para seniman sering kali menggunakan tanaman lokal seperti daun jati, jarak kepyar, jarak wulung, daun Afrika, daun acalipa, kalpataru, daun bidden, daun vitex, eucaliptus, daun suren, bunga cosmos, bunga waru, bunga insulin, dan lain-lain. Sebagai pewarna alami, *ecoprint* bisa menggunakan bahan seperti kayu secang, kayu tingi, biji jolawe, kayu tegeran, daun ketapang, daun mangga, bubuk kunir, tanin manjakani, tanin myrobalan, tanin teh hijau, dan lain-lain. Pemilihan daun atau bunga tertentu bertujuan untuk mengeluarkan guratan dan corak khas di kain.

Untuk membuat *ecoprint* sesuai pakem, dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Secara sederhana, *ecoprint* dimulai dari tahap scouring yaitu menghilangkan zat kimia di kain dengan teknik tertentu. Dilanjutkan dengan *mordant* kain untuk menambahkan mineral agar nantinya bisa mengeluarkan guratan dan warna daun/bunga yang maksimal. Kemudian menata daun atau bunga yang dilanjutkan dengan proses menggulung kain,



mengukus serta mencuci ulang. Tahap terakhir adalah mengeringkan dengan diangin-angin tanpa terkena sinar matahari langsung. Selain jenis dedaunan dan tekniknya, hasil *ecoprint* juga sangat dipengaruhi oleh pemrosesan kain serta air yang digunakan untuk merendam atau mencuci.

Mbak Naning bercerita, *Ecoprint* by Suryaning Batik dimulai dari ketidaksengajaan. Bermula dari sebuah postingan Instagram yang viral di luar negeri, Mbak Naning mulai mencari tahu tentang *ecoprint*. Darah seni yang mengalir deras dari ibu dan neneknya yang merupakan pengrajin tenun serta batik di daerah Godean membuatnya semakin penasaran untuk menggelutinya. Sebagai pewaris bisnis batik Ibu Maryuti di los 3 Pasar Beringharjo, Mbak Naning juga tergerak untuk terus mengembangkan kreativitas seninya. Oleh karena itu, beliau melirik *ecoprint* karena melihat peluang besar pada seni ini.

Di tahun 2018 bersama para founder komunitas Jogja Ecoprinter, beliau mendatangkan beberapa guru *ecoprint* kaliber nasional dan internasional. Mulai dari kelas dasar, medium hingga ke pengembangan teknik *ecoprinting* beliau ikuti, sebagai bukti keseriusannya menekuni seni baru

ini. Komunitas ini di tahun 2020 berkembang bersama Asosiasi Ecoprinter Indonesia yang berpusat di Jakarta.

Menurutnya, bergabung dengan komunitas *ecoprint* tentu saja mempunyai banyak manfaat, antara lain dapat mengikuti perkembangan *ecoprint* di seluruh Indonesia dan dunia. Secara internasional, *ecoprint* juga berkembang pesat di Turki dan Selandia Baru. Sebagai sebuah budaya baru, tentu *ecoprint* terus mengembangkan teknik-teknik mencetak dan mewarnai. Sebagai bisnis, bergabung di komunitas tentu saja membuka peluang dan link yang lebih luas.

Karena merupakan karya *handmade*, *ecoprint* by Suryaning Batik masih dibuat berdasarkan permintaan. Sebelum membuka kios di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Suryaning Batik memasarkan produk dari mulut ke mulut dan via aplikasi Whatsappblast. Lambat laun, *Ecoprint* by Suryaning Batik menemukan pangsa pasarnya. Sebagai karya seni, tentu tidak bisa satu produk sama dengan yang lain. Hal tersebut yang menjadikan karya *ecoprint* ini eksklusif di setiap lembarnya.

Dalam mengembangkan *ecoprint*, Mbak Naning menemui beberapa tantangan, di antaranya menjamurnya *ecoprint* namun tidak



disertai pemrosesan dengan kaidah yang benar. Bahkan ada yang terkesan asal-asalan, demi memenuhi permintaan pasar. Di sini, idealisme beliau sebagai seniman tertantang. Sehingga beliau memutuskan membuat *ecoprint* premium dan untuk pasar sekunder.

Menariknya, pangsa pasar premium justru ditemuinya pada warga lokal (WNI) yang menyukai motif guratan-guratan yang jelas dan terang berdasarkan pengalaman berjualan di Bandara YIA,. Sedangkan WNA justru menyukai pasar sekunder, di mana

bahan kain sering diambilkan dari blanket (kain pelapis saat pembuatan *ecoprint*).

Secara bisnis, UMKM ini sudah memiliki label Suryaning dan mengantongi NIB (Nomor Induk Berusaha) serta paten merk untuk *ecoprint* dan batik. Naning mengembangkan bisnisnya dari modal sendiri. Tidak sedikit tawaran kredit perbankan dan pemerintah berdatangan, namun sejauh ini belum diambil karena secara kapasitas sumber daya belum mencukupi.

Selain mengembangkan bisnis *ecoprint*, Mbak Naning juga

menyebarkan seni baru ini melalui edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat, bahkan membantu menjualkan karya seni anak didiknya tersebut. Selain mengajarkan cara membuat, beliau juga tidak segan berbagi tips bisnisnya.

Harapan ke depan, *ecoprint* dapat lebih berkembang di Indonesia dan diakui sebagai karya seni yang mempunyai valuasi dan nilai jual tinggi. *Ecoprint* juga dapat menjadi alternatif komoditas sandang yang aman bagi orang yang alergi dengan pewarnaan zat kimia.



PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA KEMENKEU-TWO KANWIL DJPB

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, mengikuti secara daring Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb pada 31 Januari 2025. Dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, kegiatan ini menandai komitmen pelaksanaan tugas melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja 2025 secara digital. Perjanjian ini mencakup 4 perspektif, 8 sasaran strategis, dan 16 indikator kinerja utama yang akan diterapkan di seluruh jajaran. Dirjen Perbendaharaan menegaskan dukungan DJPb terhadap program prioritas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Dengan Perjanjian Kinerja ini, Kanwil DJPb siap memperkuat peran TREFA dalam mengawal APBN di daerah.



RAPAT DENGAN KOMISI II DPR RI DAN PEMROV DIY BAHAS IMPLEMENTASI DANA TRANSFER KE DAERAH

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, menghadiri rapat dengan Komisi II DPR RI dan Pemrov DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY, pada 19 Februari 2025. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dan Sekda DIY, Beny Suharsono, ini membahas implementasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekda DIY menegaskan komitmen pemprov dalam mengelola TKD secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-W TAHUN 2024 UNAUDITED

Kanwil DJPb DIY menggelar Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2024 Unaudited secara daring pada 17 Februari 2025, diikuti oleh satuan kerja UAPPA-W lingkup DIY. Kepala Bidang PAKP Kanwil DJPb DIY, Pudji Ardi Susatyo Achmadi, menekankan pentingnya sinergi dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Bayu Sulistianoro, memaparkan ketentuan penyusunan laporan serta telaah terhadap laporan keuangan sebelumnya. Sesuai Surat Kepala Kanwil DJPb DIY, batas akhir penyampaian laporan ditetapkan pada 28 Februari 2025.



*Kaleidoskop
Kegiatan*





OPTIMALISASI BELANJA MEMANFAATKAN SUMBER DANA PNBP, DAN MENDUKUNG EFISIENSI

Kanwil DJPb DIY menggelar Forum Diskusi Kamis Pon bertema Optimalisasi Belanja Memanfaatkan Sumber Dana PNBP dengan Tetap Mendukung Kebijakan Efisiensi secara daring pada 20 Februari 2025. Acara ini diikuti oleh 25 satuan kerja pengelola PNBP untuk mempercepat realisasi belanja dan mengurangi potensi minus belanja di 2025. Mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY, Kepala Bidang PPA I, Asri Isbandiah Hadi menekankan pentingnya optimalisasi PNBP sebagai strategi kebijakan di tengah tantangan global dan kebijakan efisiensi. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan Kebijakan Maksimum Pencairan PNBP Tahap I 2025 oleh Eko Sigitpurnomo, serta mekanisme pengajuan pencairan melalui Aplikasi Digit oleh Widyastuti Puji Lestari. Dengan strategi yang tepat, belanja sumber dana PNBP diharapkan tetap akuntabel dan berkualitas.

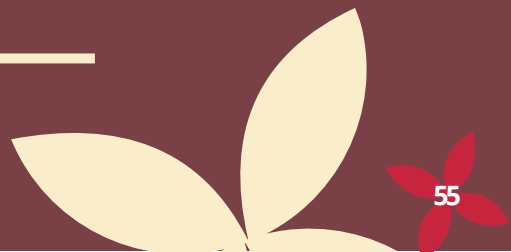
RAPAT KOMITE ALCO REGIONAL DIY REALISASI S.D. 31 JANUARI 2025

Kanwil DJPb DIY menggelar Rapat Komite ALCo Regional DIY secara daring pada 21 Februari 2025, dengan tema Pelaksanaan Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG di DIY dimulai sejak 13 Januari 2025, dengan distribusi di tiga lokasi: Kapanewon Depok (2.941 siswa, 15 sekolah), Kapanewon Cangkringan (1.544 siswa, 27 sekolah), dan Kapanewon Sentolo (2.268 siswa, 41 sekolah). Untuk mendukung program nasional ini, Pemda DIY mengalokasikan Rp42 miliar, disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat sebesar 2,5% dari PAD. Selain MBG, rapat juga membahas realisasi APBN Regional DIY per 31 Januari 2025, dengan Pendapatan dan Hibah sebesar Rp749,87 miliar serta Realisasi Belanja Negara sebesar Rp1,63 triliun.



WORKSHOP “PEMBERDAYAAN UMKM GUNA MENDUKUNG PEMANFAATAN PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT”

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, menghadiri Workshop dan Fieldtrip UMKM Sawit pada 26 Februari 2025 yang digelar oleh Politeknik LPP Yogyakarta bersama BDPKPS. Juli menekankan pentingnya dukungan APBN bagi UMKM melalui pendanaan, pelatihan, dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Wakil Direktur II Politeknik LPP, Galuh Banowati, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM pengolah produk turunan sawit. Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM DIY, Agus Mulyono, mengungkapkan bahwa 344.000 pelaku UMKM sawit masih menghadapi tantangan berkembang ke skala usaha menengah. BDPKPS pun mendorong inovasi agar UMKM sawit semakin berdaya saing.





Layanan Pengaduan



linktr.ee/pengaduankanwildjpbdiy



+628-519-454-3564



LAPOR!
LAYANAN KAPRIK DAN PENGADUAN ONLINE KEMENKEU



sipandu

Layanan Pengaduan



ANDA MENGETAHUI ADA INDIKASI KORUPSI,
SUAP, ATAU GRATIFIKASI?

SEGERA LAPORKAN!



djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id



@djpbbyogyakarta



Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta

Buletin Beringharjo ...

Buletin Ekonomi Ringan Khas Seputar Jogja

Edisi
OKTOBER 2024



Edisi
NOVEMBER 2024



Infone, Lur!



Buletin Beringharjo Kanwil DJPb DIY menerima kiriman tulisan/artikel yang akan dimuat pada terbitan berikutnya (rubrik insight/edukasi/serba-serbi/angkringan). Akan disediakan apresiasi bagi tulisan/artikel yang dimuat.

Hubungi **Angga (0812-9796-8012)**. Naskah artikel dapat dikirimkan via WhatsApp atau email:

bulletinberingharjo.djpb@gmail.com

Kami turut menerima kritik dan saran terkait Buletin Beringharjo yang dapat dikirimkan melalui WhatsApp/Email di atas.

Edisi
DESEMBER 2024



Edisi
JANUARI 2025



Tim Redaksi

Pengarah: Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY
Penanggung Jawab dan Pemimpin Redaksi : Kepala Bagian Umum
Sekretaris Redaksi I: Imam Pratikno
Sekretaris Redaksi II: Candra Riasari
Staf Sekretaris Redaksi: Amalia Pratiwi
Koordinator Pengadaan dan Distribusi: Rudita Kameswara
Staf Pengadaan dan Distribusi: Agus Ilhami
Staf Pengadaan dan Distribusi: Wening Puspitasari
Redaktur Pelaksana & Editor : Tri Angga Sigit
Editor: Rizal Bomantama
Anggota Dewan Direksi : Pujiastuti, Tengku Yustisia, Catur Sri Murniati, Bayu Sulistianoro, Alphiani Nugrahaningsih Purbasari, Joko Sumarsono, Rizqi Satria Nugraha, Erli Murti Rahayu Yuniawati, Veronica Handayani, Titik Solikah, Badri Rohman, Indah Setyasari, Muhammad Husni Thamrin, Andi Budiyanto
Kontributor : Bidang PPA I, Bidang PPA II, Bidang PPAK, Bidang SKKI, Bagian Umum, KPPN Yogyakarta, KPPN Wates, KPPN Wonosari
Koordinator Unit Desain dan Layout: Luthfan Rahmenda Allam
Anggota Unit Desain dan Layout: M. Aji Wibowo, Dimas Mulyo Nugroho, Ratna Mayasari, Mutia Rizki, Fariza Widy Athia, Vivy Nur Anifa
Sumber Foto : Tim Media Kanwil DJPb Provinsi DIY, Shutterstock, Canva, StoryPost Kemenkeu

Selalu terhubung
dengan kami

@djpbogyakarta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta
Kanwil DJPb D.I. Yogyakarta djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/

Buletin
Beringharjo ...
dapat diakses melalui:





Buletin Beringharjo ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi D.I. Yogyakarta

Jalan Solo Km. 8,6, Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta

© 2025

